

**ANALISIS PROGRAM BANTUAN RUMAH LAYAK HUNI TERHADAP
PENGENTASAN KEMISKINAN DI KECAMATAN MESUJI DALAM
PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM**



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat Guna
Mendapatkan Gelar Sarjana Ekonomi (S.E) dalam Ilmu Ekonomi Islam dan
Bisnis Islam**

Oleh

KHUSNUL KHOTIMAH

NPM : 1351010022

Progam Studi : Ekonomi Islam

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1439 H/2019 M**

**ANALISIS PROGRAM BANTUAN RUMAH LAYAK HUNI TERHADAP
PENGENTASAN EMOSKINAN DI KECAMATAN MESUJI DALAM
PERSPEKTIF EKONOMI ISLAMK**

Skripsi

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E.) Dalam Ilmu Ekonomi Islam dan
Bisnis Islam**

Oleh :

KHUSNUL KHOTIMAH

NPM: 1351010022

Program Studi : Ekonomi Islam

Pembimbing I : Prof. Dr. Tulus Suryanto, M.M., Akt, C.A

Pembimbing II : Dr. Heni Noviarita, M.Si.

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN**

LAMPUNG

1439 H / 2018M

ABSTRAK

Kemiskinan di Indonesia bukan hal yang baru kita dengar, kemiskinan merupakan permasalahan yang kompleks dan bersifat multidimensional. Salah satunya untuk mengatasi kemiskinan tersebut maka pemerintahan Kabupaten Mesuji membuat sebuah program bantuan rumah layak huni. Untuk itu kita perlu mengetahui bagaimanakah implementasi program bantuan rumah layak huni dalam dan pengaruhnya terhadap pengentasan kemiskinan di kecamatan mesuji? Dan bagaimana implementasi program bantuan rumah layak huni dalam perspektif ekonomi Islam? Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi implementasi program bantuan rumah layak huni dan pengaruhnya terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat penerima bantuan rumah layak huni di Kecamatan Mesuji, sehingga terjadi kelestarian terhadap manfaat bantuan rumah layak huni dan Untuk mengetahui implementasi program bantuan rumah layak huni dalam mengentaskan kemiskinan masyarakat pada Kecamatan Mesuji menurut ekonomi Islam.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif, dengan menggunakan dua jenis sumber data, yaitu data primer dan data sekunder yang didapat dengan menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Setelah data terkumpul, selanjutnya data dianalisis dengan menggunakan pendekatan deskriptif analisis.

Hasil penelitian ini adalah bahwa Program bantuan rumah layak huni yang di danai pemerintah di Kecamatan Mesuji sudah dijalankan dengan baik sesuai dengan teknik operasional kegiatan, dalam pelaksanaan kegiatannya sudah baik dan masyarakat sudah berpartisipasi dalam kegiatan pelaksanaan program tersebut yang diberikan pemerintah untuk rakyat. Sementara dalam perspektif ekonomi Islam penyebab kemiskinan dapat digolongkan pada standar pemenuhan kebutuhan masyarakat yaitu kebutuhan *Daruriyyah* (kebutuhan primer), *kebutuhan Hajjiyyah* (kebutuhan sekunder) dan kebutuhan *Tahsiniyyah* (kebutuhan tersier), Seorang muslim harus mengalokasikan anggarannya secara urut sesuai dengan tingkatan prioritasnya secara konsisten. Kebutuhan pada tingkat pertama harus dipenuhi, baru kemudian kebutuhan yang kedua dan ketiga. Konsumsi setelah dari ketiga ini diperkenankan akan tetapi tetap sesuai dengan syariat Islam.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Alamat: Jl. Endro Suratmin Sukarame 1 Bandar Lampung Tlp. (0721)703289

PERSETUJUAN

**Judul Skripsi : Analisis Program Bantuan Rumah Layak Huni Terhadap
Pengentasan Kemiskinan Di Kecamatan Mesuji Dalam
Perspektif Ekonomi Islam**
Nama Mahasiswa : Khusnul Khotimah
NPM : 1351010022
Jurusan : Ekonomi Syari'ah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

MENYETUJUI

Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah Fakultas
Ekonomi dan Bisnis Islam UIN RadenIntan Bandar Lampung.

Bandar Lampung, 09 Januari 2018

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Prof. Dr. Tulus Suryanto, MM, Akt
NIP.197009262008011008

Dr. Heni Noviarita, M.Si
NIP.196511201992032002

Mengetahui
Ketua Jurusan Ekonomi Islam

Madnasir, S.E., M.Si
NIP.19750424 2002121001



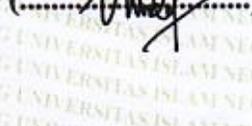
KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Tlp. (0721)703289, 780421

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **“Analisis Program Bantuan Rumah Layak Huni Terhadap Pengentasan Kemiskinan Di Kecamatan Mesuji Dalam Perspektif Ekonomi Islam”** disusun oleh **Khusnul Khotimah, NPM: 1351010022, Jurusan Ekonomi Syari’ah**, telah diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Raden Intan Lampung pada Hari/ Tanggal:

TIM MUNAQASYAH

Ketua : H. Supaijo, S.H., M.H. (.....)
Sekretaris : Yeni Susanti, MA. (.....)
Penguji I : Prof. Dr. Tulus Suryanto, M.M, Akt. CA (.....)
Penguji II : Fatih Fuadi, M.Si. (.....)

Dekan,
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung


Dr. Moh. Bahrudin, M.A
NIP. 195808241 98903 1 003

MOTTO

(Al-Qur'an Surat Ar-Ra'ad ayat 11)

فَارْغَبْ رَبِّكَ إِلَىٰ ۙ فَأَنْصَبْ فَرَّغْتَ فَإِذَا ۙ يُسْرًا ۙ الْعُسْرَ مَعَ إِنَّ

Artinya : “6. *Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, 7. Maka apabila kamu Telah selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain,8. Dan Hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap.*”

PERSEMBAHAN

Dengan rasa syukur kepada Allah SWT dan dari hati yang terdalam atas rasa karunia dan barokahnya sehingga saya bisa menyelesaikan karyatulis kecilku ini. Sebagai tanda bakti cinta yang tulus kupersembahkan karyatulis ini kepada:

1. Kedua orang tuaku, Ayahku Budi Wahyonodan Ibuku Kasiyati yang selalu senantiasa berdo'a untuk kesuksesan anaknya, mencurahkan kasih sayangnya yang tiada henti, memberikan motivasi dan dengan sabar menantikan keberhasilanku, sehingga mengantarkanku meraih gelar sarjana.
2. Kedua adikku Khoirun Nisa dan Henik Cahyaning Tiyas serta seluruh keluarga besarku yang selalu memberi semangat serta yang aku sayangi dan aku cintai. Serta seluruh keluarga besar kakek Warsito dan kakek tukiman. Berkat doa, dukungan dan senyum semangatnya Khusnul mampu menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
3. Almamater tercinta Universitas Islam Negeri (UIN) RadenIntan Lampung tempatku menimba Ilmu dan telah mendidikku menjadi mampuberfikir lebih maju, hingga mendapatkan gelar Sarjana.
4. Sahabat seperjuangan Ekonomi Islam angkatan 2013 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Raden Intan Lampung. Semoga kita benjadi alumni yang bermanfaat dengan pancaran nilai-nilai Rabbani.

RIWAYAT HIDUP

Penulis dianugrahi nama oleh Ayahanda dan Ibunda tercinta yaitu Khusnul Khotimah. Dilahirkan di Desa Sidomulyo, Kec Mesuji, Kab Mesuji. Pada tanggal 09 Januari 1995. Anak pertama dari tiga bersaudara atas pasangan Bapak Budi Wahyono dan Ibu Kasiyati.

Riwayat pendidikan penulis yang diselesaikan adalah SD Negeri 01 Sidomulyo yang terselesaikan pada tahun 2007, Kemudian melanjutkan ke Pondok Pesantren Darul ‘Ulum Sekampung Lampung Timur pada tahun 2007-2013. Dan ditahun yang sama 2007 melanjutkan kejenjang pendidikan di SMP Darul ‘Ulum Sekampung Lampung Timur yang di selesaikan pada tahun 2010. Selanjutnya penulis melanjutkan jenjang pendidikan di MA Ma’arif Nu 05 Sekampung Lampung Timur Kabupaten Lampung Timur yang terselesaikan pada tahun 2013. Dengan mengucapkan Alhamdulillah dan puji syukur kehadirat Allah SWT serta berkat dorongan dan dukungan dari Ayahanda dan Ibunda, akhirnya penulis mempunyai kesempatan untuk dapat melanjutkan jenjang perguruan tinggiya itu UIN Raden Intan Lampung di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam prodi Ekonomi Islam pada tahun 2013.

Adapun penulis selama dalam aktif diperkuliahan pada fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung, ikut aktif organisasi dalam bentuk Unit Kegiatan Mahasiswa INKAI (UKM), sebagai bendahara umum di UKM INKAI (Institut Karate-Do Indonesia) pada tahun 201-2016, selanjutnya pada tahun 2016 penulis mengikuti kejuaraan Gubernur Cup se-lampung.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis haturkan atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan Karunia-Nya berupa ilmu pengetahuan, kesehatan, dan petunjuk, sehingga skripsi dengan judul “*Analisis Program Bantuan Rumah Layak Huni Terhadap Pengentasan Kemiskinan Di Kecamatan Mesuji Dalam Perspektif Ekonomi Islam* ” dapat diselesaikan, shalawat serta salam disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, para sahabat, dan pengikut-pengikutnya yang setia.

Skripsi ini ditulis sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi pada program Strata Satu (S1) Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E.) dalam bidang ekonomi Islam.

Atas bantuan semua pihak dalam proses menyelesaikan skripsi ini, tak lupa dihaturkan terima kasih sedalam-dalamnya. Secara rinci ungkapan terima kasih itu disampaikan kepada:

1. Prof. Dr. Moh. Mukri, M.Ag. selaku Rektor UIN RadenIntan Lampung yang selalu memotivasi mahasiswa untuk menja dipribadi yang berkualitas dan menjunjung tinggi nilai-nilai Islami.
2. Dr. Moh. Bahrudin, MA. Selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN RadenIntan Lampung beserta stafnya yang telah memberi kemudahan sehingga dapat menempuh ujian sarjana.

3. Madnasir, S.E., M.Si, dan Deki Fermansyah, M.Si, selaku Ketua dan Sekretaris Jurusan Ekonomi Islam yang senantiasa sabar dalam memberi arahan serta selalu motivasi dalam penyelesaian skripsi ini.
4. Prop. Dr. Tulus Suryanto, MM., AKt., C.A dan Dr. Heni Noviarita, M.Si. selaku pembimbing dalam penulisan skripsi ini, yang telah menyediakan waktu dan bimbingan yang sangat berharga dalam mengarahkan dan memotivasi penulis, sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.
5. Terimakasih kepada tim Munaqasyah, Prof.Dr. Tulus suryanto, M.M.,Akt., C.A sebagai penguji I, bapak Fatih Fuadi, M. S. I sebagai penguji II, H. Supaijo, S,H.,M.H.sebagai ketua siding dan ibu Yeni Susanti, M.A sebagai sekretaris.
6. Bapak dan Ibu Dosen serta Karyawan pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan motivasi serta memberikan ilmu yang bermanfaat kepada penulis hingga dapat menyelesaikan studi. Pimpinan dan karyawan Perpustakaan fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dan Institut yang telah memberikan informasi, data, referensi, dan lain-lain.
7. Bapak Sunardi, SE, selaku camat di Kecamatan Mesuji dan beserta staff yang telah bersedia membantu penulis dalam memberikan data dan informasi yang penulis butuhkan sampai terselesaikannya skripsi ini.

8. keluargaku graha harmoni Sakinah Wulandari, Lia Fitriani, Hanna Aulia, Ulfa Farida, Taras Nayana, semoga persahabatan kita selalu dalam lindungan Allah.
9. Keluargaku UKM INKAI UIN Raden Intan Lampung khususnya Apriyadi, Rahkhmad Apriyan Wijayadi, Rido Kurnia, Salamayanti, Suwaybatul Aslamiyah, Lia Firiani dan seluruh Senpai dan Kohai trimakasih atas semua motivasi dan saran yang telah diberikan.
10. Sahabat seperjuangan Ekonomi Islam 2013 khususnya kelas E yang selalu bersama dalam proses belajar, berjuang bersama menghadapi proses perkuliahan UTS dan UAS hingga proses sekripsi. Kalian luarbiasa Fitriani, Siti Nurma Rosmita, Rika Maya Sari, Roudlotul Jannah, Yeti Oktarosiana, Nurul Maya, Umi Mursidah, Umi Romah, Selma Purnama Sari yang selalu mendukung dan menjadi inspirasi bagi penulis untuk dapat bersemangat dalam kegiatan perkuliahan khususnya dalam penulisan sekripsi ini. Semoga ilmu yang kita raih bersama-sama bermanfaat dan berkah dunia akhirat.
11. Untuk Apriyadi, S.Pd yang telah membantu dan memberikan motifasi serta memberikan semangat dukungan dan doanya agar terselesaikan skripsi ini untuk menjemput gelar sarjana.

Penulis menyadari bahwa hasil penelitian ini masih jauh dari kesempurnaan. Hal ini dikarenakan kemampuan ilmu dan teori yang penulis kuasai. Untuk itu kepada para pembaca kiranya dapat memberikan masukan dan saran-saran sehingga laporan penelitian ini akan lebih baik. akhirnya dengan segala kerendahan hati, penulis berharap semoga skripsi ini memberi manfaat bagi kita semua.

Bandar Lampung, 09 Januari 2018
Penulis,

Khusnul Khotimah
1351010022

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
PERSETUJUAN.....	iii
PENGESAHAN.....	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN.....	vi
RIWAYAT HIDUP	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL	xv

BAB IPENDAHULUAN

A. Penegasan Judul	1
B. Alasan Memilih Judul	3
C. Latar Belakang Masalah.....	4
D. Rumusan Masalah	20
E. Tujuan dan Manfaat Penelitian	21
F. Metode Penelitian.....	22

BAB II LANDASAN TEORI

A. Tinjauan Tentang Kemiskinan	29
1. Pengertian Kemiskinan	29
2. Bentuk dan Jenis Kemiskinan	32
3. Indikator Kemiskinan.....	34
4. Faktor-faktor Penyebab Kemiskinan.....	42
5. Kriteria atau Ciri-ciri Kemiskinan	67

6. Pengentasan Kemiskinan	69
7. Kemiskinan dalam perspektif Islam.....	73
B. Program Bantuan Rumah Layak Huni	77
1. Pengertian Program Bantuan Rumah Layak Huni	77
2. Tujuan, Sasaran dan Karakteristik Program Bantuan Rumah Layak Huni.....	79
3. Mekanisme Penyaluran Bantuan Rumah Layak Huni	80
4. Pendamping Pelaksana.....	80
5. Pengawas.....	80
C. Kajian Penelitian Terdahulu.....	80

BAB III LAPORAN HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	82
1. Gambaran Umum Kecamatan Mesuji	82
2. Kondisi Penduduk Kecamatan Mesuji	86
3. Kondisi Penduduk Berdasarkan Agama.....	88
4. Kondisi Perekonomian Kecamatan Mesuij.....	89
5. Kondisi Perumahan	90
B. Program Bantuan Rumah Layak Huni	91
C. Pelaksanaan Program Bantuan Rumah Layak huni	94

BAB IV ANALISIS DATA

A. Implementasi Program Bantuan Rumah Layak Huni Untuk Masyarakat Miskin terhadap Pengentasan Kemiskinan di Kecamatan Mesuji	96
B. Implementasi Program Bantuan Rumah Layak Huni Dalam Mengentaskan Kemiskinan di Kecamatan Mesuji Dalam Perspektif Ekonomi Islam.	108

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.....	113
B. Saran.....	114

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

1.1 Jumlah Penduduk Miskin dan Persentase Penduduk Miskin	19
1.2 Presentase Penduduk Miskin Menurut Provinsi di Sumatera Tahun 2011 – 2015 (dalam satuan persen)	11
1.3 Presentase Tingkat Kemiskinan Kabupaten/Kota Provisis Lampung 2014-2015	13
1.4 Pola konsumsi Masyarakat Kecamatan Mesuji	76
1.5 Distribusi Penduduk Kecamatan Mesuji Berdasarkan Pendidikan	77
1.6 Distribusi Penduduk Kecamatan Mesuji Berdasarkan Agama	78
1.7 Distribusi Penduduk Kecamatan Mesuji Berdasarkan jenis pekerjaan	78
1.8 Kondisi Perumahan	79

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Judul merupakan gambaran utama permasalahan pada suatu penelitian karya ilmiah. Sebelum penulis menguraikan pembahasan lebih lanjut mengenai skripsi ini terlebih dahulu akan dijelaskan beberapa istilah yang terdapat dalam penelitian. Hal ini dilakukan untuk menghindari adanya ketidakjelasan dan kesalahpahaman dalam memahami maksud dan tujuan dari judul penelitian ini.

Penelitian yang akan penulis lakukan ini adalah berjudul: **“Analisis Program Bantuan Rumah Layak Huni Terhadap Pengentasan Kemiskinan di Kecamatan Mesuji Dalam Perspektif Ekonomi Islam”**.

Adapun beberapa istilah yang perlu penulis uraikan yaitu sebagai berikut:

1. Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya.¹
2. Program/Rancangan adalah seperangkat kegiatan yang akan dilakukan dengan penggunaan sumber daya yang tersedia dan menghasilkan manfaat.²

¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Gramedia Pustaka Utama: Jakarta, 2011),h. 58.

3. Rumah lalak huni adalah tempat tinggal yang memenuhi syarat kesehatan, keamanan, dansosial.³
4. Kemiskinan adalah sebagai salah satu keadaan dimana seseorang tidak sanggup memelihara dirinya sendiri sesuai dengan taraf kehidupan kelompok dan ketidak mampuan dalam memenuhi kebutuhan pokok.⁴
5. Perspektif adalah suatu kumpulan atau asumsi maupun keyajinan tentang sesuatu hal.⁵
6. Ekonomi Islam adalah suatu cabang Ilmu pengetahuan yang berupaya untuk memandang, menganalisis dan akhirnya menyelesaikan permasalahan-permasalahan ekonomi dengan cara-cara yang islami.⁶

Menurut Chapra ekonomi Islam adalah sebagai suatu cabang pengetahuan yang membantu merealisasikan kesejahteraan manusia melalui suatu alokasi dan distribusi sumber daya langka yang seirama dengan *maqasid* (tujuan-tujuan syari'ah), tanpa mengekang kebebasan individu, menciptakan keseimbangan makroekonomi dan ekologi yang

² Malayu S.P. Hasibun, *Menejemen Dasar, Pengertian dan Masalah* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2015), h. 91.

³ MubarokdanCayatin, *IlmuKesehatanMasyarakatTeoridanAplikasi* (PT.SalembaMedika: Gresik, 2008), h. 68.

⁴Lincoln Arsyat, *Ekonomi Pembangunan*(Yogyakarta : Universitas Gajah Mada, 2015), h. 299.

⁵ Yusuf Qhadrawi, *Fikih. Zakat. Muassasat Ar-risalah*, Cet II, Bairut Libanon, 1408./1991terjemah Didin Hafifudin, h. 1.

⁶Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI).*Ekonomi Islam* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), h. 17.

berkepanjangan, atau melemahkan solidaritas keluarga dan social serta jaringan moral masyarakat.⁷

Dari beberapa penjelasan diatas maka dapat penulis simpulkan bahwa yang dimaksud dalam judul ini adalah suatu pelaksanaan “Analisis Program Bantuan Rumah Layak Huni di Kecamatan Mesuji Terhadap Pengentasan Kemiskinan Dalam Perspektif Ekonomi Islam”.

B. Alasan Memilih Judul

Adapun yang menjadi alasan penulis memilih dan menetapkan judul di atas adalah sebagai berikut:

1. Alasan Objektif

Mengingat bahwa kemiskinan merupakan masalah sosial yang mendasar dihadapi oleh bangsa Indonesia, sehingga Pemerintah mengeluarkan salah satu kebijakan atau program yaitu program bantuan rumah layak huni untuk masyarakat miskin yang merupakan bentuk perlindungan sosial dan juga merupakan sarana penting untuk meringankan dampak kemiskinan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Setelah diadakan observasi *prasurvey* pada Kecamatan Mesuji banyaknya masyarakat penerima bantuann atau rumah tangga miskin yang belum mengetahui manfaat dan tujuan program rumah layak huni, sehingga terjadinya kesenjangan pada implementasi program

⁷Imamudin Yuliadi, *Ekonomi Islam, Sebuah Pengantar* (Yogyakarta: Lembaga Pengkajian dan Pengamalan Islam (LPPI) , 2001), h. 7.

bantuan rumah layak huni. Oleh karena itu penulis tertarik untuk mengangkat judul ini.

2. Alasan Subjektif

Dari aspek yang akan dibahas, permasalahan tersebut sangat memungkinkan diadakan penelitian dan penulis ingin mengkaji lebih dalam tentang implementasi program bantuan rumah layak huni terhadap pengentasan kemiskinan, mengingat literatur dan sumber informasi dalam penulisan ini cukup tersedia.

Kajian ini sesuai dengan disiplin ilmu penulis yaitu ekonomi Islam serta didukung oleh lokasi penelitian yang terjangkau sehingga memudahkan dalam pengumpulan data.

C. Latar Belakang

Kemiskinan merupakan permasalahan yang kompleks dan bersifat multidimensional. kemiskinan tidak hanya terjadi di kota saja namun juga sebagian besar terjadi di pedesaan. Menurut Emil Salim,⁸ yang dimaksud dengan kemiskinan adalah suatu keadaan yang menggambarkan kurangnya pendapatan untuk memenuhi kebutuhan pokok. Kebutuhan pokok dapat diartikan sebagai suatu paket barang atau jasa yang diperlukan oleh setiap orang untuk bisa hidup secara manusiawi. Paket ini terdiri dari sandang, pangan dan papan.

⁸ Abu Ahmadi, *Ilmu Sosial Dasar* (Jakarta: Renika Cipta, 2003), h. 344.

Secara umum, kemiskinan disebabkan karena kebutuhan manusia yang bermacam-macam, adanya ketidaksamaan pola kepemilikan sumber daya yang menimbulkan distribusi pendapatan yang timpang, hal ini terlihat bahwa mayoritas penduduk miskin hanya memiliki sumber daya alam dalam jumlah yang terbatas. Selain itu, tingkat pendidikan juga mempengaruhi kualitas sumber daya manusia. Tingkat pendidikan yang rendah tentunya akan mengakibatkan ketidak mampuan dalam mengembangkan diri dan menyebabkan sempitnya peluang dalam mendapatkan lapangan pekerjaan, sehingga mempengaruhi tingginya tingkat pengangguran. Tingginya tingkat pengangguran disuatu Negara ini, yang selanjutnya dapat menyebabkan kemiskinan serta permasalahan sistem ekonomi dan politik bangsa yang bersangkutan yang kurang mendukung ekonomi rakyat.⁹

Proses ini berlangsung secara timbal balik dan saling terkait, yang pada akhirnya secara akumulatif memperlemah masyarakat miskin. Masalah ini jika tidak segera di tanggulangi akan memperparah kondisi masyarakat miskin, yang berdampak pada lemahnya etos kerja, rendahnya daya perlawanan terhadap berbagai persoalan hidup, kebiasaan-kebiasaan buruk yang terpaksa mereka lakukan sebagai jalan pintas untuk mempertahankan hidup mereka, apabila keadaan ini berkelanjutan, maka akan melahirkan budaya kemiskinan yang sulit untuk diberantas.

⁹ Sri Edi Suwarsono. *Sekitar Kemiskinan dan Keadilan* (Jakarta : Cendikiawan Tentang Islam UI Press, 2007), h. 24.

Pernyataan di atas sejalan dengan apa yang dikemukakan dalam Al-Qur'an tentang kondisi kemiskinan, dimana ada orang yang diberikan rezeki lapang dan ada pula yang dalam kondisi sempit (miskin). Seperti yang dijelaskan dalam surah Al-Israa' Ayat 30:¹⁰

إِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا

Sesungguhnya Tuhanmu melapangkan rezki kepada siapa yang Dia kehendaki dan menyempitkannya; Sesungguhnya Dia Maha mengetahui lagi Maha melihat akan hamba-hamba-Nya.

Ayat di atas menjelaskan bahwa adanya perbedaan perolehan harta yang berbeda antar umat manusia. Bentuk ungkapan ini tidak mempertentangkan antara yang kaya dengan miskin, atau lapang dengan sempit, adanya batasan antara si kaya dengan miskin akan mengakibatkan adanya strata sosial yang terjadi di masyarakat jika dilihat dari pandangan ekonomi. Tentu saja batasan tersebut adalah bagi manusia yang mampu dalam mencari kesempatan kerja, memiliki *skill* atau ketrampilan sesuai dengan kerja, mau bekerja keras dan bersungguh-sungguh, tipe manusia yang seperti ini lah yang diberikan kelapangan rezeki oleh Allah SWT.

¹⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Surabaya :CV Mahkota, Edisi Revisi, 1996), h. 108.

Masalah yang paling besar dihadapisetiapNegaraadalahkemiskinan.¹¹ Kemiskinan adalah salah satu masalah yang sulit dihadapi oleh para pembuat kebijakan. Keluarga-keluarga miskin mempunyai kemungkinan lebih besar menjadi tunawisma, ketergantungan obat, kekerasan dalam rumah tangga, masalah kesehatan, kehamilan remaja, buta huruf, pengangguran dan pendidikan yang rendah.

Kemiskinan dapat diartikan sebagai akibat dari ketiadaan demokrasi, yang mencerminkan hubungan kekuasaan yang menghilangkan kemampuan mereka sendiri, sehingga mayoritas penduduk kurang memperoleh alat-alat produksi (lahan dan teknologi) dan sumberdaya (pendidikan, kredit, dan akses pasar). Selain itu, kurangnya mekanisme yang memadai untuk akumulasi dan distribusi.¹² Islam memandang kemiskinan merupakan satu hal yang mampu membahayakan akhlak, kelogisan berpikir, keluarga dan juga masyarakat Islam pun menanggapinya sebagai musibah dan bencana yang seharusnya memohon perlindungan kepada Allah SWT atas kejahatan yang tersembunyi didalamnya, jika kemiskinan ini semakin merajalela, maka ini akan menjadi kemiskinan yang mampu membuatnya lupaakan Allah SWT dan juga rasa sosialnya kepada sesama. Ini bagaikan seorang kaya yang apabila terlalu menjadi seperti raja, maka kekayaannya menjadikan seperti seseorang

¹¹Sulastomo, *Sistem Jaminan Nasional: Mewujudkan Amanat Konsitusi* (Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama, 2011),h.14.

¹²Chriswardani Suryawati, “*Memahami Kemiskinan Secara Multidimensional*”, (Jurnal Kesehatan Masyarakat, UNDIP, Semarang), h. 1-3.

yang zalim, baik kepada Allah SWT maupun manusia lainnya, ada beberapa bentuk kedzaliman seperti dzalim kepada Allah SWT, manusia, dan dzalim kepada dirinya sendiri.¹³ Sebagai mana firman Allah dalam surah Ibrahim ayat .¹⁴

Pernyataan ayat diatas dikemukakanya setelah menyebutkan aneka nikmat Allah, seperti langit, bumi, hujan, laut, bulan, matahari dan sebagainya. Sumberdaya alam yang disiapkan Allah untuk umat manusia tidak terhingga dan tidak terbatas. Seandainya sesuatu telah habis, maka ada *alternatif* lain yang disediakan Allah selama manusia berusaha. Oleh karena itu, tidak ada alasan untuk berkata bahwa sumberdaya alam terbatas. Tetapi sikap manusia terhadap pihak lain, dan sikapnya terhadap dirinya itulah yang menjadikan sebagian manusia tidak memperoleh sumber daya alam tersebut. Kemiskinan terjadi akibat adanya ketidak seimbangan dalam perolehan atau penggunaan sumber daya alam itu, yang diistilahkan oleh ayat diatas dengan sikap aniaya, atau karena keengganan manusia menggali sumberdaya alam untuk mengangkatnya kepermukaan, atau untuk menemukan *alternatif* pengganti. Dan kedua hal terakhir inilah yang diistilahkan oleh ayat diatas dengan sifat *kufur*.¹⁵

¹³ Nurul Huda, dkk, *Ekonomi Pembangunan Islam* (Jakarta: Kencana, 2015), h. 20-21.

¹⁴ Departemen Agama RI, *Op. Cit*, h.

¹⁵ M. Quraish shihab, *Wawasan Tafsir Tematik Atas Berbagai Persoalan Umat* (Bandung: 2014), h.594.

Kemiskinan di Indonesia merupakan masalah sosial yang relevan untuk dikaji terus menerus. Pada tahun 1990, melalui laporan Bank Dunia *World Development Report on Poverty* telah mendeklarasikan bahwa suatu peperangan yang berhasil melawan kemiskinan perlu dilakukan secara serentak pada tiga front, yaitu: (i) pertumbuhan ekonomi yang luas dan miskin; (ii) pengembangan SDM (pendidikan, kesehatan, dan gizi), yang memberi mereka kemampuan yang lebih baik untuk memanfaatkan kesempatan-kesempatan yang diciptakan oleh pertumbuhan ekonomi; dan (iii) membuat suatu jaringan pengaman sosial untuk mereka diantara penduduk miskin yang sama sekali tidak mampu untuk mendapatkan keuntungan-keuntungan dari pertumbuhan ekonomi dan kesempatan pengembangan SDM akibat ketidakmampuan fisik dan mental, bencana alam, konflik sosial, dan terisolasi secara fisik.¹⁶ Untuk mendukung strategi yang tepat dalam memerangi kemiskinan, diperlukan intervensi-intervensi pemerintah yang sesuai dengan sasaran atau tujuan perantarannya dapat dibagi menurut waktunya, yaitu jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.¹⁷ Berikut disajikan persentase kemiskinan di Indonesia dalam periode 2011-2017 jumlah penduduk miskin di Indonesia mengalami penurunan dan juga peningkatan. Menurut peneliti, hal ini karena program-program pemerintah telah berperan dengan baik dalam upaya menurunkan angka

¹⁶ Tulus Tambunan, *Perekonomian Indonesia* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), h. 130.

¹⁷ *Ibid*, h.132.

kemiskinan di Indonesia. Tabel dibawah ini memaparkan jumlah penduduk miskin dan persentase penduduk miskin dari tahun 2011-2017.

Tabel 1.1.

Jumlah Penduduk Miskin dan Persentase Penduduk Miskin

Tahun	Jumlah (juta orang)	Persentase
Maret2011	30.02	12.49%
Sep 2011	29.89	12.36%
Maret2012	29.13	11.96%
Sep 2012	28.59	11.66%
Maret2013	28.07	11.37%
Sep 2013	28.55	11.47%
Maret 2014	28.28	11.25%
Sep 2014	27.73	10.96%
Maret 2015	28.29	11.22%
Sep 2015	28.51	11.13%
Maret 2016	28.01	10.86%
Sep 2016	27.76	10.70%
Maret 2017	27.77	10.64%
Sep 2017	26.56	10.12%

Sumber :*Badan Pusat Statistik Indonesia Tahun 2017*

Dari tabel di atas jumlah tertinggi penduduk miskin Indonesia terjadi pada tahun 2011. Pada tahun 2017 jumlah penduduk miskin sebesar 28,56 juta jiwa, ini berarti penduduk miskin di Indonesia semakin berkurang. Program-program Pemerintah jelas membantu. Contohnya seperti Program Bedah Rumah, Program Bantuan Langsung Tunai (BLT), Program Masyarakat Mandiri (PNPM Mandiri).

Di zaman yang serba global, peranan pemerintah untuk melakukan pembangunan ekonomi khususnya merupakan kunci menuju masyarakat yang

lebih makmur.¹⁸ Tujuan kebijakan ekonomi adalah menciptakan kemakmuran. Salah satu ukuran kemakmuran terpenting adalah pendapatan.¹⁹ Kemakmuran tercipta karena ada kegiatan yang menghasilkan pendapatan. Pendapatan regional adalah tingkat besarnya pendapatan masyarakat pada wilayah analisis. Tingkat pendapatan dapat diukur dari total pendapatan wilayah maupun pendapatan rata-rata masyarakat pada wilayah tersebut.

Kemiskinan merupakan masalah yang sangat kompleks. Permasalahan di Provinsi Lampung adalah masih tingginya angka kemiskinan jika dibandingkan dengan Provinsi lain di Pulau Sumatera. Data Statistik menunjukkan bahwa tahun 2011 sampai 2015 angka penduduk miskin Provinsi Lampung menduduki urutan ke tiga dari sepuluh provinsi yang ada di Pulau Sumatera yaitu sebesar 14,90 persen. Rata-rata tingkat kemiskinan tertinggi yaitu terjadi di provinsi Nangro Aceh Darussalam yaitu sebesar 18,34 persen. Sedangkan rata-rata persentase kemiskinan terendah terjadi di provinsi Bangka Belitung yaitu sebesar 5,37 persen. Berikut disajikan tabel data persentase penduduk miskin menurut provinsi se pulau Sumatera.

¹⁸ Sanusi Bachrawi, *Pengantar Ekonomi Pembangunan* (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), h. 74.

¹⁹ Robinson Tarigan, *Ekonomi Regional Teori dan Aplikasi Edisi Revisi* (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), h.13.

Tabel 1.2
Presentase Penduduk Miskin Menurut Provinsi
di Sumatera Tahun 2011 – 2015 (dalam satuan persen)

Provinsi	2011*)	2012*)	2013*)	2014	2015	Rata-rat
Acah	19,57	19,46	17,60	17,94	17,11	18,34
Sumatra Utara	11,33	10,67	10,06	10,13	10,79	10,59
Sumatra Barat	9,04	8,19	8,14	7,53	6,71	7,92
Riau	8,47	8,22	7,72	8,17	8,82	8,28
Jambi	8,65	8,42	8,07	7,92	9,12	8,44
Sumatera selatan	14,24	13,78	14,24	13,81	13,77	13,97
Bengkulu	17,49	17,0	18,34	17,48	17,16	17,49
Lampung	16,57	15,65	14,39	14,21	13,68	14,90
Bangka belitung	5,75	5,53	5,21	5,36	4,83	5,73
Kepulauan riau	7,40	7,11	6,46	6,7	5,78	6,69

Sumber :*Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung Tahun 2016*

Efektivitas dalam menurunkan jumlah penduduk miskin merupakan pertumbuhan utama dalam memilih strategi atau instrumen pembangunan²⁰ yang harus dilakukan oleh pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Oleh karena itu pemerintah provinsi Lampung kian fokus dalam menanggulangi masalah kemiskinan tersebut. Pemerintah Provinsi Lampung telah menentukan program penanggulangan kemiskinan untuk tahun 2015 hingga 2019 dengan program Gerakan Membangun Desa Sai Bumi Ruwa Jurai (Gerbang Desa Saburai) pada bulan Desember 2015. Selain itu menentukan target, sasaran, dan sinergitas program dalam penanggulangan kemiskinan di Provinsi Lampung, Pemerintah Provinsi juga telah membentuk Tim Penanggulangan Kemiskinan yang sebagian besar

²⁰Whisnu Adhi Saputra, “Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk, PDRB, IPM, Pengangguran Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Kabupaten /Kota Jawa Tengah” (Jurnal Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro, dipublikasikan tahun 2011).

anggotanya adalah satuan kerja perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung. Sehingga setiap SKPD memiliki peran dalam penanggulangan Kemiskinan di daerah itu.

Kondisi kemiskinan seperti yang telah dijelaskan sebelumnya tidak jauh berbeda dengan kondisi kemiskinan yang ada pada masyarakat Kecamatan Mesuji Kabupaten Mesuji. Mesuji merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Lampung yang mempunyai luas wilayah 625 km², berpenduduk 377.857 jiwa terdiri dari 195.400 laki-laki dan 182.457 perempuan. Dari segi luas wilayah, Kabupaten Mesuji saat ini merupakan Kabupaten terkecil, sekaligus terpadat di Provinsi Lampung. Kabupaten Mesuji terdiri dari 11 Kecamatan. salah satu kecamatan yang berada di Kabupaten Mesuji adalah Kecamatan Mesuji yang terdiri dari 11 kelurahan yaitu: Sidomulyo, Wiralaga Mulya, Wiralaga 1, Wiralaga 2, Nipah Kuning, sungai badak, Sumber makmur, Suka Maju, mulya Asri, Tanjung Serayan, Tanjung Seneng.

Tabel 1.3
Presentase Tingkat Kemiskinan
Kabupaten/Kota Provinsi Lampung 2014-2015

Nama Kab/Kota	2014			2015		
	PO	P1	P2	PO	P1	P2
Lampung Barat	13.70	1.82	0.36	14.18	2.37	0.56
Tanggamus	14.95	2.39	0.60	14.26	1.98	0.46
Lampung Selatan	16.77	2.14	0.47	16.27	2.66	0.71
Lampung Timur	17.05	2.87	0.72	16.91	2.51	0.63
Lampung Tengah	13.13	1.85	0.41	13.30	2.41	0.59
Lampung Utara	23.32	3.71	0.98	23.20	4.08	1.14

Way Kanan	15.03	2.03	0.42	14.61	2.18	0.49
Tulang Bawang	8.66	1.61	0.46	10.25	1.84	0.51
Pesawaran	17.51	2.56	0.64	17.61	3.12	0.75
Pringsewu	9.83	1.15	0.21	11.80	1.40	0.25
Mesuji	6.57	0.77	0.17	8.20	1.04	0.24
Tulang Bawang Barat	7.12	0.74	0.14	8.23	1.48	0.36
Pesisir Barat	-	-	-	15.8	15.8	0.64
Kota Bandar Lampung	10.60	1.53	0.38	10.33	1.26	0.24
Kota Metro	10.60	1.53	0.38	10.33	1.26	0.24

Sumber: BPS Provinsi Lampung, 2016

Tabel 1.3 di atas menunjukkan bahwa persentase penduduk miskin di Kabupaten/Kota Provinsi Lampung tertinggi adalah Kabupaten Lampung Utara. Data badan pusat statistik menyebutkan bahwa Kabupaten Mesuji merupakan Kabupaten dengan presentase terendah keempat setelah Kabupaten Pringsewu, Tulang Bawang dan Tulang Bawang Barat. Hal ini dikarenakan Kabupaten Mesuji memiliki banyak potensi baik dilihat dari pendidikan, industri, pariwisata, pertambangan, perikanan, transportasi dan pertanian, perkebunan dan kehutanan. Apa lagi saat ini, pembangunan di Kabupaten Mesuji dalam bidang infrastruktur, perekonomian, pendidikan dan kesehatan masih dikembangkan untuk lebih memajukan Kabupaten Mesuji.

Meskipun Mesuji merupakan Kabupaten dengan presentase kemiskinan yang rendah menurut data Provinsi, akan tetapi hal itu tidak terlihat jika kita melihat wilayah-wilayah di Mesuji yang jelas bertolak belakang dengan data badan statistik Provinsi. Keadaan masyarakat yang ada dipelosok masih jauh dari kata layak, hal ini terlihat dari perbaikan

perekonomian di pedesaan masih sangat minim sekali dilakukan, seperti yang terjadi pada Kecamatan Mesuji.

Untuk mengatasi masalah kemiskinan, pemerintah telah melakukan berbagai program untuk menanggulangnya. Adapun program pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan yaitu salah satunya melalui program bantuan perumahan terhadap masyarakat miskin. Diharapkan program ini dapat membantu masyarakat memenuhi kebutuhan dasarnya, karena kemiskinan pada umumnya membuat masyarakat hanya memenuhi kebutuhan pangan dan sandang.

Perlu adanya peran yang serius dari pemerintah dalam menangani angka kemiskinan ini, melalui program bantuan rumah tidak layak huni ini diharapkan dapat membantu masyarakat memenuhi kebutuhan rumah yang sehat dan layak huni sebagaimana mestinya. Kebutuhan akan rumah merupakan salah satu kebutuhan manusia setelah pangan dan sandang. Setiap individu manusia pada dasarnya akan mengutamakan pemenuhan kebutuhan dasarnya dari pada kebutuhan sekundernya. Begitu pula kebutuhan akan rumah, setiap orang akan berusaha memenuhi kebutuhan rumah dalam setiap tingkat kehidupan masyarakat dengan memperhatikan selera dan kemampuan yang dimilikinya.

Menurut Pasal 1 ayat (7) UU No 1 Tahun 2011 tentang perumahan, rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat

penghuninya, serta aset bagi pemiliknya. Rumah memiliki fungsi yang sangat besar bagi individu dan keluarga tidak saja mencakup aspek fisik, tetapi juga mental dan sosial. Untuk menunjang fungsi rumah sebagai tempat berlindung, secara mental memenuhi rasa kenyamanan dan secara sosial dapat menjaga privasi setiap anggota keluarga, menjadi media bagi pelaksanaan bimbingan serta pendidikan keluarga. Dengan terpenuhinya salah satu kebutuhan dasar berupa rumah yang layak huni, diharapkan tercapai ketahanan keluarga.²¹

Salah satu Kabupaten yang melaksanakan Program rumah layak huni adalah Kabupaten Mesuji. Program rumah layak huni di Kabupaten Mesuji di mulai pada tahun 2015. Program ini merupakan program pemerintah Kabupaten Mesuji guna meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan bagi masyarakat di daerahnya, dimana hal tersebut adalah merupakan tanggung jawab pemerintah untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur.

Program ini memberikan bantuan berupa pembangunan rumah layak huni yang dibangun atau terletak diatas tanah milik masyarakat yang kurang mampu. Program rumah layak huni ini dananya bersumber dari APBD Kabupaten Mesuji. Jumlah dana pada pembangunan rumah layak huni pada tahun 2017 sebesar Rp15-20 Juta per unitnya, namun di beberapa daerah harga perunitnya bisa saja berbeda tergantung kondisi wilayah. Sedangkan untuk fisik bangunannya dibuat beton dengan tipe 36, berlantai keramik lengkap dengan

²¹ Undang – undang Nomor 01 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Pemukiman

kamarmandi, atap seng.

Pelaksanaan program pembangunan/ pengadaan Rumah Layak Huni di lakukan pada Kementerian Perumahan Rakyat Republik Indonesia, dan dalam tingkat kabupaten Badan Pemberdayaan Masyarakat (BAPEMAS) Kabupaten Mesuji yang tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman. BAPEMAS sebagai pelaksana teknis yang bertugas member sosialisasi tentang penyusunan daftar rencana kegiatan dan membantu pencairan dana bantuan rumah layak huni. Sedang kanpada setiap desanya dibuat organisasi kelompok masyarakat (POKMAS) yang menangani dan bertanggung jawab tentang pelaksanaan Program Rumah Layak Huni pada setiap desanya. Kelompok sasaran program rumah layak huni adalah masyarakat miskin yang memiliki rumah tidak layak huni atau tidak memiliki rumah dan mempunyai tanah milik sendiri atau hibah.

Salah satu kecamatan yang melaksanakan program rumah layak huni di Kabupaten Mesuji adalah Kecamatan Mesuji yang terdiri dari 11 kelurahan. Semua kelurahan di Kecamatan Mesuji setiap tahun mendapatkan bantuan rumah layak huni. Penduduk di Kecamatan Mesuji mayoritas berprofesi sebagai petani. yang mana dari sebagian masyarakat belum mempunyai rumah sendiri atau rumah mereka masih jauh dari kriteria layak.

Adapun kriteria untuk ukuran sederhana rumah layak huni yang dibangun yaitu rumah dilengkapi fasilitas MCK (mandi, cuci, kakus).

Sedangkan persyaratan atau kriteria masyarakat miskin yang berhak mendapatkan rumah sederhana layak huni berdasarkan BAPEMAS tersebut antarlain :

1. Memiliki Kartu TandaPenduduk (KTP)
2. Memiliki Kartu Keluarga(KK)
3. Kondisi rumahnyatelah rusak atau tidak layak pakai lagi.
4. Mata pencaharian petaniatau buruh.
5. Membuat Surat perjanjian untuk tidak menjual rumah.
6. Memiliki surat tanah milik pribadi / hibah.
7. KepalaKeluargadalam kedaancacat fisik.

Program bantuan rumah layak huni merupakan bentuk subsidi papan dalam bentuk uang yang diperuntukkan bagi rumah tangga berpenghasilan rendah sebagai upaya dari pemerintah untuk meningkatkan ketahanan papan dan memberikan perlindungan sosial pada rumah tangga sasaran. Keberhasilan program rumah layak huni ini diukur berdasarkan tingkat pencapaian indikator 6T, yaitu : tepat sasaran, tepat jumlah, tepat harga, tepat waktu, tepat kualitas, tepat administrasi. Program ini bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran rumah tangga sasaran (RTS) melalui pemenuhan sebagian kebutuhan papan dalam bentuk uang dan mencegah penurunan konsumsi energi dan protein.Selain itu program bantuan rumah layak huni bertujuan untuk meningkatkan dan memberikan tempat tinggal yang sehat untuk di huni dengan

nominasi jumlah bantuan yang di tentukan.²²

Di Kabupaten Mesuji hampir keseluruhan kecamatan yang tersebar di setiap kabupaten Mesuji sudah menerima bantuan rumah layak huni. dan kecamatan Mesuji salah satu kecamatan yang berada di kabupaten Mesuji sudah sejak tahun 2015 menerima bantuan ini. Masyarakat kecamatan Mesuji tergolong miskin banyak yang menerima bantuan rumah layak huni yaitu sejumlah 200 kepala keluarga pada tahun 2017. Mata pencaharian masyarakat lebih mendominasi pada sektor pertanian seperti sawah dan lading. Sebagian lain menggantungkan hidupnya pada hasil buruh, berdagang, membuka industri rumahan, dan lain-lain. Sektor pertanian yang lebih mendominasi akan tetapi kecamatan ini masih saja terpuruk dalam hal papan. Tingkat pendidikan masyarakat masih cukup rendah terutama pada daerah-daerah terpencil yang tidak dibarengi dengan keahlian kreatifitas menjadikan banyaknya pengangguran pada masyarakat. Dengan adanya program bantuan rumah layak huni di kecamatan Mesuji dapat membantu masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dalam segi hal kebutuhan papan dan jika tujuan program bantuan rumah layak huni dapat terlaksana dengan baik dapat membantu mengentaskan kemiskinan masyarakat.²³

Maka dari itu Perlu adanya peran yang serius dari pemerintah dalam menangani angka kemiskinan ini, melalui program bantuan rumah layak

page 1. ²²[http://www.tnp2k.go.id/id/tanya-jawab/klaster-i/kemiskinan/diakses tanggal 18 Mei 2016](http://www.tnp2k.go.id/id/tanya-jawab/klaster-i/kemiskinan/diakses%20tanggal%2018%20Mei%202016),

²³ Ibtak S.E, "wawancara prasurvey dikantor kecamatan Mesuji" (Mesuji: 23 juli 2017).

huni ini diharapkan dapat membantu masyarakat memenuhi kebutuhan rumah yang sehat dan layak huni sebagaimana mestinya. Kebutuhan akan rumah merupakan salah satu kebutuhan manusia setelah pangan dan sandang. Setiap individu manusia pada dasarnya akan mengutamakan pemenuhan kebutuhan dasarnya dari pada kebutuhan sekundernya. Begitu pula kebutuhan akan rumah, setiap orang akan berusaha memenuhi kebutuhan rumah dalam setiap tingkat kehidupan masyarakat dengan memperhatikan selera dan kemampuan yang dimilikinya.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti tertarik dan merasa perlu mengadakan penelitian untuk mengetahui secara mendalam tentang program bantuan rumah layak huni, yaitu dengan mengangkat judul penelitian:

“ ANALISIS PROGRAM BANTUAN RUMAH LAYAK HUNI TERHADAP PENGENTASAN KEMISKINAN DI KECAMATAN MESUJI DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM”.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas dan untuk memperjelas arah penelitian, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana implementasi program bantuan rumah layak huni dan pengaruhnya terhadap pengentasan kemiskinan di Kecamatan Mesuji?
2. Bagaimana implementasi program bantuan rumah layak huni dalam perspektif ekonomi Islam?

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Pada umumnya suatu penelitian bertujuan untuk menemukan, menguji, dan mengembangkan suatu pengetahuan. Demikian pula dengan penelitian yang akan penulis lakukan. Adapun tujuan khusus yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui implementasi program bantuan rumah layak huni dan pengaruhnya terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat penerima bantuan rumah layak huni di Kecamatan Mesuji, sehingga terjadi kelestarian terhadap manfaat bantuan rumah layak huni.
- b. Untuk mengetahui implementasi program bantuan rumah layak huni dalam mengentaskan kemiskinan masyarakat pada Kecamatan Mesuji menurut ekonomi Islam.

2. Manfaat Penelitian

- a. Bagi Pemerintah
 - 1) Sebagai dasar yang objektif dalam pengambilan keputusan serta sebagai pedoman untuk menentukan langkah-langkah yang akan dilakukan oleh perusahaan di masa yang akan datang.
 - 2) Merancang strategi bantuan yang tepat untuk mengentaskan kemiskinan.
- b. Bagi Peneliti

- 1) Untuk memperdalam pengetahuan peneliti dibidang program bantuan rumah layak huni dan pengentasan kemiskinan.
 - 2) Sebagai implementasi atas teori yang telah didapat pada perkuliahan dan menambah wawasan akan kasus nyata dalam dunia pembangunan.
- c. Bagi Pihak Lain
- 1) Sebagai sarana dan media untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan sebagai bahan referensi untuk menambah wacana baru bagi dunia akademis.
 - 2) Memperkaya khasanah penelitian yang ada serta dapat digunakan sebagai pembandingan penelitian berikutnya.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan sifat penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan dilakukan adalah penelitian kualitatif. Menurut Sugiyono, kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat.

postpositivisme, digunakan untuk meneliti objek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci.²⁴ Metode kualitatif

²⁴Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, (Bandung: ALFABETA), 2014, h.9

digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam yang mengandung makna. Makna adalah data yang sebenarnya di lapangan.

Penelitian ini dilakukan dengan terjun langsung ke Dinas Kecamatan Mesuji dan masyarakat miskin yang mendapat bantuan, guna mendapatkan data yang sesuai dengan kenyataan di lapangan.

b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, karena dalam penelitian ini memberikan gambaran tentang program bantuan rumah layak huni. Deskriptif adalah penelitian yang diarahkan untuk memberikan gejala-gejala, fakta-fakta atau kejadian-kejadian secara sistematis dan akurat, mengenai sifat-sifat populasi atau daerah tertentu.²⁵

2. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder.²⁶

a. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari responden atau objek yang diteliti. Sumber data primer langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data primer yang dimaksud dalam penelitian ini adalah data-data yang penulis peroleh secara langsung dengan

²⁵Sumadi Suryabrata, *Metode Penelitian*, (Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada), 2015, h.75

²⁶Sugiyono, *Op.cit*, h.225

melakukan interview (wawancara) kepada para staf dan masyarakat yang mendapatkan bantuan rumah layak huni.

- b. Data sekunder merupakan sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen. Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan, atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip (data dokumenter) yang dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan. Dan dalam penelitian ini data diperoleh dari data-data yang dimiliki oleh dinaskecamatan Mesujidan masyarat miskin yang mendapatkan bantuan rumah layak huni, Jurnal, Artikel, Buku, Koran, Majalah, dll.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi dari keseluruhan karakteristik dari objek yang diteliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan.²⁷ Dalam konteks ini populasi yang diambil adalah Camat Mesuji dan staf Kecamatan Mesuji, dan beberapa masyarakat miskin. Maka dapat disimpulkan bahwa dalam suatu penelitian terdapat suatu populasi perlu mendapat pertimbangan berapa besar populasi tersebut, sehingga jika suatu populasi tidak memungkinkan untuk diteliti seluruhnya perlu diambil sebagian saja, yang bisa dinamakan sampel.

²⁷*Ibid*, h.80

b. Sampel

Sampel adalah kelompok kecil yang diamati dan merupakan bagian dari populasi sehingga sifat dan karakteristik populasi juga dimiliki oleh sampel.²⁸ Jika populasi besar dan peneliti tidak memungkinkan mempelajari seluruh yang ada dalam populasi. Sampel yang diambil harus betul-betul representatif atau dapat mewakili. Dalam penelitian kali ini peneliti mengambil sampel sebanyak 20 sampel, 5 orang dari pihak Kantor Kecamatan Mesuji dan 15 orang dari masyarakat yang mendapatkan bantuan rumah layak huni. Hal ini dikarenakan keterbatasan dana, tenaga dan waktu, selain itu karena tidak semua populasi mau dimintai informasi.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi.²⁹

a. Observasi

Metode observasi adalah metode pengamatan yang dilakukan secara sengaja, sistematis mengenai fenomena sosial dengan gejala-gejala psikis untuk kemudian dilakukan pencatatan. Dalam hal ini penulis langsung ke lokasi penelitian dengan tujuan mendapatkan data tentang analisis program bantuan rumah layak huni terhadap

²⁸ *Ibid*, h 81

²⁹ *Ibid*, h.137

pengentasan kemiskinan di Kecamatan Mesuji dalam perspektif Ekonomi Islam pada dinas Kecamatan Mesuji dan masyarakat Miskinserta melakukan pengamatan lapangan pada pelaksanaan program bantuan rumah layak huni yang terkait. Penelitian ini adalah penelitian non partisipan yang artinya peneliti hanya mengamati dan memperoleh data dari luar tanpa ikut berpartisipasi dalam kegiatan, peneliti hanya sebagai pengamat independen.

b. Wawancara (interview)

Metode wawancara adalah teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti untuk melakukan studi pendahuluan demi menemukan permasalahan yang harus diteliti dan juga untuk mengetahui hal-hal dari respondennya sedikit. Dalam proses ini penulis melakukan wawancara yang tidak berstruktur yaitu melakukan wawancara yang bersifat bebas (berbincang-bincang) dengan Kepala Dinas kecamatan mesuji, Staf Dinas Kecamatan Mesuji, para penerima bantuan rumah layak huni.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mengumpulkan sejumlah besar fakta dan data yang tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi misalnya catatan harian, biografi, kebijakan, foto dan lain sebagainya. Adapun pelaksanaan metode ini adalah dengan mencatat data yang ada pada dokumen-dokumen, catatan harian, buku pedoman,

dan arsip yang ada pada Dinas Kecamatan mesuji serta foto-foto rumah yang mendapat bantuan.

5. Pengolahan Data

Setelah sumber mengenai data dikumpulkan berdasarkan sumber diatas, maka langkah selanjutnya adalah pengolahan data yang diproses sesuai dengan kode etik penelitian dengan cara pemeriksaan data (*editing*).

Pemeriksaan data (*editing*) adalah pengecekan atau pengoreksian data yang telah terkumpul, tujuannya untuk menghilangkan kesalahan-kesalahan yang terdapat pada pencatatan dilapangan dan bersifat koreksi.

6. Teknis Analisis Data

Aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas. Aktivitas dalam analisis data yaitu data *reduction*, data *display* dan *conclusion drawing verification*.³⁰

a. *Data Reduction* (reduksi data)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu.

b. *Data display* (penyajian data)

³⁰*Ibid*,h. 246

Penyajian data dapat dilakukan dengan bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sebagainya.

c. *Concluding drawing/Verification*

Concluding drawing/Verification adalah penarikan kesimpulan dan memverifikasi masalah hasil temuan yang akan menjawab rumusan masalah penelitian yang dirumuskan sejak awal.

Setelah penulis memperoleh data-data dan informasi yang diperlukan dari lapangan, lalu penulis mengolahnya secara sistematis sesuai dengan sasaran permasalahan yang ada dan menganalisisnya.

Penulis akan menganalisis secara deskriptif kualitatif berupa kata-kata, tulisan atau lisan dari orang-orang yang berperilaku dapat dimengerti. Analisis deskriptif ini dipergunakan dengan menguraikan dan merinci kalimat-kalimat yang ada dengan menggunakan pendekatan berfikir deduktif.

Deduktif adalah cara berfikir yang berdasarkan pada pengetahuan-pengetahuan umum, fakta-fakta yang umum, fakta-fakta yang unik dan mernagkai fakta-fakta yang umum itu menjadi suatu pemecahan yang bersifat khusus.³¹ Dengan metode tersebut akan diuraikan program bantuan rumah layak huni terhadap pengentasan kemiskinan kemudian ditarik kesimpulan secara khusus dari penafsiran awal.

³¹Cholid Narbuko, Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara), 2015, h.18

BAB II

LANDASAN TEORITIS

A. Tinjauan Tentang Kemiskinan

1. Pengertian Kemiskinan

Menurut para ahli kemiskinan itu bersifat multidimensional. Artinya, karena kebutuhan manusia itu macam-macam, maka kemiskinan pun memiliki banyak aspek. Dilihat dari kebijakan umum, maka kemiskinan meliputi aspek primer yang berupa miskin akan asset, organisasi sosial politik dan pengetahuan juga keterampilan. Dan aspek sekunder yang berupa miskin akan jaringan sosial, sumber-sumber keuangan dan informasi. Dimensi-dimensi kemiskinan tersebut termanifestasikan dalam bentuk kekurangan gizi, air, perumahan yang sehat, perawatan kesehatan yang kurang baik, dan tingkat pendidikan yang rendah.³²

Menurut Ravallion kemiskinan adalah kelaparan, tidak memiliki tempat tinggal bila sakit tidak mempunyai dana untuk berobat. Orang umumnya tidak dapat membaca karena tidak mampu bersekolah, tidak memiliki pekerjaan, takut menghadapi masa depan, kehilangan anak

³²Lincoln Arsyat, *Op. Cit*, h. 299

karena sakit. Kemiskinan adalah ketidakberdayaan, terpinggirkan dan tidak memiliki rasa bebas.³³

Berdasarkan Undang-Undang No. 13 Tahun 2011 tentang penanganan fakir miskin, kemiskinan adalah kondisi sosial ekonomi seseorang atau sekelompok orang yang tidak terpenuhinya hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Kebutuhan dasar yang menjadi hak seseorang atau sekelompok orang meliputi kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumber daya alam, lingkungan hidup, rasa aman dari perlakuan atau ancaman dari tindakan kekerasan, dan hak untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan kehidupan sosial dan politik. Laporan Bidang Kesejahteraan Rakyat yang dikeluarkan oleh kementerian Bidang Kesejahteraan (Kesra) tahun 2004 menerangkan pula bahwa kondisi yang disebut miskin ini juga berlaku pada mereka yang bekerja akan tetapi pendapatannya tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan pokok/dasar.

Kemiskinan adalah suatu kondisi ketidakmampuan secara ekonomi untuk memenuhi standar hidup rata-rata masyarakat di suatu daerah. Kondisi ketidakmampuan ini ditandai dengan rendahnya kemampuan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan pokok baik berupa pangan, sandang, maupun papan. Kemampuan pendapatan yang rendah ini juga

³³Ibid, h. 230.

akan berdampak berkurangnya kemampuan untuk memenuhi standar hidup rata-rata seperti standar kesehatan masyarakat dan standar pendidikan.³⁴

Dari sisi lain, Fernandez menambahkan tentang beberapa ciri masyarakat miskin ditinjau dari beberapa aspek, antara lain:

- a. Aspek Politik yaitu tidak memiliki akses keproses pengambilan keputusan yang menyangkut hidup mereka.
- b. Aspek Sosial yaitu tersingkir dari instansi utama masyarakat yang ada.
- c. Aspek Ekonomi yaitu rendahnya kualitas sumber daya manusia, termasuk kesehatan, pendidikan, ketrampilan yang berdampak pada rendahnya penghasilan dan rendahnya kepemilikan atas aset lingkungan hidup seperti air bersih dan penerangan.
- d. Aspek Budaya atau Nilai yaitu terperangkap kedalam budaya rendahnya kualitas sumber daya manusia seperti lemahnya etos kerja, berpikir pendek dan mudah menyerah.

Oleh karena itu, masalah kemiskinan ini masih tetap relevan dan penting untuk dikaji dan diupayakan penanggulangannya, kalau tujuan pembangunan nasional yang adil dan merata serta terbentuknya manusia Indonesia seutuhnya yang ingin dicapai.³⁵

³⁴Prof. Dr. Sam F. Poli, M.A, *Memberdayakan Kaum Miskin* (Yogyakarta: 2005), h. 75.

³⁵*Ibid.*

2. Bentuk Dan jenis Kemiskinan

Kemiskinan mempunyai makna yang luas dan memang tidaklah mudah untuk mengukurnya. Namun, dalam bagian ini akan dijelaskan macam ukuran kemiskinan yang paling umum digunakan, yaitu kemiskinan absolut, kemiskinan relatif, kemiskinan kultural dan kemiskinan struktural, Kemiskinan Absolut.³⁶

a. Kemiskinan Absolut

Pada dasarnya, konsep kemiskinan seringkali dikaitkan dengan sebuah pemikiran atas tingkat pendapatan dan kebutuhan. Perkiraan atas tingkat kebutuhan biasanya dibatasi pada kebutuhan pokok atau kebutuhan dasar minimum yang memungkinkan seseorang untuk dapat hidup secara layak. Jika pendapatan tidak dapat mencapai kebutuhan minimum, maka orang dapat dikatakan miskin. Tingkat pendapatan minimum merupakan pembatas antara keadaan miskin dan tidak miskin atau sering disebut dengan garis batas kemiskinan. Konsep ini sering disebut dengan kemiskinan absolut. Konsep ini dimaksudkan untuk menentukan tingkat pendapatan minimum yang cukup untuk memenuhi kebutuhan fisik terhadap makanan, pakaian dan perumahan untuk menjamin kelangsungan hidup.

³⁶.Lincoln Arsyad, *Op.Cit*, h. 301.

b. Kemiskinan Relatif

Orang yang sudah mempunyai tingkat pendapatan yang dapat memenuhi kebutuhan dasar minimum tidak selalu berarti orang tersebut miskin. Beberapa pakar berpendapat bahwa meskipun pendapatan seseorang sudah mencapai tingkat kebutuhan dasar minimum, namun ternyata pendapatan orang tersebut masih jauh lebih rendah dari orang yang ada disekitarnya, maka orang tersebut masih berada dalam kategori miskin. Ini terjadi karena kemiskinan lebih banyak ditentukan oleh keadaan sekitarnya, dari lingkungan orang yang bersangkutan. Konsep kemiskinan ini yang kemudian dikenal dengan konsep kemiskinan relatif. Di samping itu terdapat bentuk-bentuk kemiskinan yang sekaligus menjadi faktor penyebab kemiskinan yaitu: kemiskinan natural, kultural dan struktural.

1) Kemiskinan Natural

Kemiskinan natural adalah karena dari awalnya memang miskin. Kelompok masyarakat ini menjadi miskin karena tidak memiliki sumber daya yang memadai baik sumber daya alam, sumber daya manusia maupun pembangunan. kemiskinan natural ini merupakan kemiskinan yang disebabkan oleh faktor-faktor alamiah seperti karena cacat, sakit, usia lanjut atau karena bencana alam. Kemiskinan ini merupakan kemiskinan yang sudah parah dan pada

umumnya merupakan daerah yang krisis sumber daya alamnya atau daerah yang terisolasi.

2) Kemiskinan Kultural

Kemiskinan kultural adalah bentuk kemiskinan yang terjadi sebagai akibat adanya sikap dan kebiasaan seseorang atau masyarakat yang umumnya berasal dari budaya atau adat istiadat yang relatif tidak mau untuk memperbaiki taraf hidup dengan tata cara modern. Kebiasaan seperti ini dapat berupa sikap malas, pemboros atau tidak pernah hemat, kurang kreatif, dan relatif pula bergantung pada pihak lain.

3) Kemiskinan Struktural

Kemiskinan struktural adalah bentuk kemiskinan yang disebabkan karena rendahnya akses terhadap sumber daya yang pada umumnya terjadi pada suatu tatanan sosial budaya ataupun sosial politik yang kurang mendukung adanya pembebasan kemiskinan. Bentuk kemiskinan seperti ini juga terkadang memiliki unsur diskriminatif.

3. Indikator Kemiskinan

Beberapa macam ukuran yang seringkali digunakan sebagai indikator kemiskinan, antara lain: tingkat konsumsi beras per tahun,

tingkat pendapatan, indeks kesejahteraan masyarakat, dan indeks kemiskinan manusia.³⁷

a. Tingkat Konsumsi Beras

Tabel 2.1
Indikator Kemiskinan dilihat dari Konsumsi Beras Pertahun³⁸

No	Kategori	Konsumsi Beras (Kg)	
		Pedesaan	Perkotaan
1	Melarat	180 kg	270 kg
2	Sangat Miskin	240 kg	360 kg
3	Miskin	320 kg	480 kg

Secara umum Profesor Sayogyo mengatakan bahwa penduduk pedesaan digolongkan miskin jika mengkonsumsi beras kurang dari 240 kg per kapita per tahun, sedangkan, untuk daerah perkotaan adalah 360 kg per kapita per tahun. Patokan ini sebenarnya menggambarkan garis yang sangat miskin karena hanya didasarkan atas jumlah pangan minimal yang diperlukan untuk sekedar menyambung hidup. Namun, sejak tahun 1979 sampai sekarang garis melarat dihilangkan dan kemudian ditambah dengan garis Miskin, yaitu untuk daerah pedesaan setara dengan 480 kg per kapita per tahun dan untuk daerah perkotaan setara dengan 720 kg per kapita per tahun.

³⁷*Ibid.* h. 303.

³⁸*Ibid.* h. 303.

b. Tiingkat Pendapatan

Batas garis kemiskinan antara daerah perkotaan dan pedesaan, presentase penduduk miskin di indonesia laporan pada tahun 2013 yang dikeluarkan BPS menunjukan bahwa “jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan dibawah garis kemiskinan)”.

Tabel 2.2
Jumlah Penduduk Miskin Desember 2014-2015

No	Wilayah	Bulan/Tahun	Jumlah (Ribu)	Presentase (%)
1	Nasional	Maret 2014	28,280.03	11.25
		Maret 2015	28,592.79	11.22
2	Kota	Maret 2014	10,507.20	8.34
		Maret 2015	10,652.64	8.29
3	Desa	Maret 2014	286.097	14.25
		Maret 2015	17,940.15	14.21

Sumber : BPS Tahun 2016

Berdasarkan tabel 2.2 di atas presentase penduduk miskin sebagian besar terkonsentrasi didaerah perkotaan dan pedesaan. Dimana tampak adanya kecendrungan bahwa presentase penduduk miskin sebagian besar terkonsentrasi didaerah pedesaan. Hal ini mengidentifikasikan rendahnya kualitas hidup masyarakat di pedesaan. Adanya ketimpangan dalam pola pembangunan dan belum termanfaatkannya sumber daya yang ada di pedesaan secara menyeluruh hanya merupakan sedikit dari sekian banyak permasalahan yang menyebabkan keerbakelakangan di daerah tersebut.

Perbedaan yang mencolok pada penepatan garis kemiskinan anantara daerah pedesaan dan perkotaan karena dinamika kehidupan yang berbeda antara keduanya. Penduduk di daerah perkotaan memiliki kebutuhan yang relatif sangat beragam dibandingkan dengan daerah pedesaan. Sehingga mempengaruhi pola pengeluaran mereka.

Kesejahteraan Masyarakat

Indikator kesejahteraan ini dilihat dari 9 komponen, yaitu kesehatan, konsumsi makanan dan gizi, pendidikan, kesempatan kerja, perumahan, jaminan sosial, sandang, rekreasi, dan kebebasan. Namun, yang sering digunakan hanya empat komponen, yaitu kesehatan, konsumsi makanan dan gizi, pendidikan dan perumahan. sedangkan indikator yang lainnya sulit diukur dan sulit dibandingkan antar daerah atau antar waktu.

c. Indeks Kemiskinan Manusia

Indeks ini diperkenalkan oleh UNDP (United National Development Program) dalam salah satu laporan tahunan, Human Development Report. Indeks ini terlahir karena ketidak puasaan UNPD dengan indikator pendapatan per dollar per hari yang digunakan oleh bank dunia sebagai tolak ukur kemiskinan disuatu wilayah atau negara. Dengan adanya indeks ini, UNPD sengaja mengganti ukuran kemiskinan dari segi pendapatan (Bank Dunia) dengan ukuran dari segi pendapatan kualitas hidup manusia. Argumen umum yang

digunakan oleh UNPD adalah bahwa tolak ukur kemiskinan dari seseorang adalah jika dia tidak mampu menjangkau (atau bahkan tidak mempunyai akses) terhadap sarana publik dasar dan tingkat kualitas hidup mereka sendiri adalah rendah. Jadi, bukan berapa banyak pendapatan per dollar per kapita yang mampu mereka raih tiap harinya. Ada tiga nilai pokok yang menentukan tingkat kemiskinan yaitu :

- 1). Tingkat kehidupan, dengan asumsi bahwa karena tingkat kesehatan yang begitu rendah, sehingga lebih dari 30 persen penduduk negara-negara terbelakang tidak mungkin hidup lebih dari 40 tahun.
- 2). Tingkat pendidikan dasar, diukur oleh presentase penduduk usia dewasa yang buta huruf, dengan beberapa penekanan tertentu, misalnya hilangnya hak pendidikan pada kaum wanita.
- 3). Tingkat kemampuan ekonomi, diukur oleh presentase penduduk yang tidak memiliki akses terhadap sarana kesehatan dan air bersih, serta presentase anak-anak dibawah usia lima tahun yang kekurangan gizi.

Oleh karena itu, nilai indeks kemiskinan manusia mempresentasikan proporsi jumlah penduduk di suatu wilayah yang kehilangan tiga nilai pokok tersebut. angka indeks kemiskinan manusia

yang rendah menunjukkan tingkat kemiskinan yang rendah pula, begitu juga sebaliknya.³⁹

Islam membahas kemiskinan muncul banyak pengertian disebabkan tolak ukur kemiskinan yang digunakan berbeda antara satu negara dengan negara lainnya. Demikian juga dengan Islam. Menurut Al-Ghazali, mendefinisikan kemiskinan sebagai ketidakmampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhan mereka sendiri baik dari segi kebutuhan material dan keutuhan rohani. Argumen tersebut juga dibuat oleh Ahmed, kemiskinan bukan hanya merupakan perampasan barang dan jasa, tetapi juga kurangnya kemiskinan dalam roh.⁴⁰ Islam menganggap kemiskinan merupakan suatu hal yang mampu membahayakan akhlak, kelogisan berfikir, keluarga dan juga masyarakat. Al-Qur'an memberikan peringatan terhadap manusia yang melalaikan kemiskinan, seperti dalam surah Al-Maa'uun ayat 1- 7:

أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ ﴿١﴾ فَذَلِكَ الَّذِي يَدْعُ أَلْيَتِيمَ ﴿٢﴾
 وَلَا تَحْضُ عَلَىٰ طَعَامِ الْمَسْكِينِ ﴿٣﴾ فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ ﴿٤﴾ الَّذِينَ هُمْ
 عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ ﴿٥﴾ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ ﴿٦﴾ وَيَمْنَعُونَ
 الْمَاعُونَ ﴿٧﴾

³⁹Lincoln Arsyat, Op.Cit. h. 303-306.

⁴⁰Nurul Huda, dkk. *Ekonomi Pembangunan Islam* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), h.23

Artinya : 1. Taukah kamu (orang) yang mendustakan agama? 2. Itulah orang yang menghardik anak yatim, 3. dan tidak mendorong memberi makan anak yatim, 4. Maka celakalah orang yang shalat, 5. (yaitu) orang-orang yang lalai terhadap shalatnya, 6. Yang berbuat ria, 7. Dan enggan (memberikan) bantuan.⁴¹

Surah Al-mMaa'uun ayat 1-7 menunjukkan bahwa kemiskinan itu berada semenjak manusia itu ada. Banyak orang mengaku beragama dan shalat tetapi tidak ingin menolong orang-orang yang lemah dan miskin adalah termasuk kedalam golongan orang-orang yang mendustakan agama. Secara implisit pengertian tersebut mengandung makna bahwa kemiskinan dan ketidak miskinan akan selalu ada agar manusia saling tolong menolong.⁴² Allah swt juga berfirman dalam surat Al-Muddatstsir ayat 42-47:

مَا سَأَلَكُمْ فِي سَقَرٍ ﴿٤٢﴾ قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ ﴿٤٣﴾ وَلَمْ نَكُ نَطْعِمُ الْمَسْكِينِ ﴿٤٤﴾ وَكُنَّا خُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ ﴿٤٥﴾ وَكُنَّا نَكْذِبُ بِيَوْمِ الدِّينِ ﴿٤٦﴾ حَتَّىٰ أَتْنَا الْيَقِينَ ﴿٤٧﴾

Artinya: 42. Apakah yang memasukkan kamu ke dalam Saqar (neraka)? 43. Mereka menjawab: Kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan shalat, 44. Dan kami tidak (pula) memberi makan orang miskin, 45. Dan adalah kami membicarakan yang bathil, bersama dengan orang-orang yang membicarakannya, 46. Dan

⁴¹Departemen Agama RI, *Op.Cit*, h.483.

⁴²Ishomuddin, *Sosiologi Perspektif Islam*(Malang: UMM Pres, 2005), h. 353.

*adalah kami mendustakan hari pembalasan,47. Hingga datang kepada kami kematian*⁴³.

Ayat di atas mengemukakan sebab-sebab dicampakkannya segolongan manusia kedalam neraka di hari kemudian kelak. Salah satu dari sebab-sebab itu karena mereka tidak memberi makan kepada orang miskin atau tidak peduli terhadap penderitaan yang dialami oleh orang-orang yang hidupnya melarat. Hal ini memberi petunjuk bahwa memberi makan kepada orang miskin atau kepedulian terhadap nasib orang-orang yang melarat merupakan salah satu dari perintah agama yang harus ditegakkan. Perintah ini memiliki kedudukan yang penting seperti halnya perintah agama kepada manusia agar menegakan shalat atau menyembah Allah.

Allah sudah memerintahkan umat islam untuk memperhatikan kesenjangan ekonomi sebagaimana yang telah dijelaskan dalam surat Al-Maa'uun. Dalam sisi *supply*, Allah mengajarkan muslim yang untuk optimis dalam berusaha mencari rezeki sebagai motivasi meningkatkan produktifitas, dan meningkatkan kesabaran sebagai benteng mental menghadapi kondisi yang kurang memadai, serta beriman kepada Allah SWT.

⁴³Departemen Agama RI, Op.Cit. h.459

Rezeki yang berbeda yang diberikan antara manusia yang satu dengan yang lainnya akan menyebabkan kecemburuan sosial jika dilihat dari segi ekonomi, namun pemberian rizqi yang berbeda jika dilihat dari sisi demand, Islam mempunyai mekanisme distribusi pendapatan, yaitu dengan zakat. Mekanisme ini sanggup meredam kecemburuan sosial dan mencukupi kebutuhan pokok golongan kelas bawah seperti pangan, kesehatan dan pendidikan.⁴⁴

4. Faktor-Faktor Penyebab Kemiskinan

Kemiskinan yang terjadi di Negara-negara berkembang disebabkan karena kebutuhan manusia yang bermacam-macam, adanya ketidaksamaan pola kepemilikan sumber daya, yang menimbulkan distribusi pendapatan yang timpang, hal ini terlihat bahwa mayoritas penduduk miskin hanya memiliki sumber daya alam dalam jumlah yang terbatas. Selain itu, tingkat pendidikan juga mempengaruhi kualitas sumber daya manusia. Tingkat pendidikan yang rendah tentunya akan mengakibatkan ketidakmampuan dalam mengembangkan diri dan menyebabkan sempitnya peluang dalam mendapatkan lapangan pekerjaan, sehingga mempengaruhi tingginya tingkat pengangguran. Tingginya tingkat pengangguran di suatu Negara ini, yang selanjutnya dapat menyebabkan kemiskinan.

⁴⁴Ishomuddin, *Sosiologi Perspektif Islam*(Malang: UMM Pres, 2005), h. 353.

Kemiskinan disebabkan oleh adanya ketimpangan dan kesenjangan oleh kaum kapitalis berhasil mengutamakan nilai-nilai ekonomi dari pada nilai yang lainnya. Seperti nilai politik mereka leluasa mempekerjakan kaum buruh dengan semena-mena. Dari berbagai kesenjangan ada di dalam kehidupan sosial yang membuat kum miskin menjadi semakin miskin dan orang-orang yang berada ditingkaytan astas menjadi semakin makmur.⁴⁵

Para pembuat kebijakan pembangunan selalu berupaya agar alokasi sumber daya dapat dinikmati oleh sebgian besar anggota masyarakat. Namun, karena ciri dan kondisi masyarakat yang sangat beragam dan ditambah pula dengan tingkat kemajuan ekonomi negara yang bersangkutan yang terkadang masih lemah, maka kebijakan nasional umumnya diarahkan untuk memecahkan permasalahan jangka pendek. Sehingga, kebijakan pemerintah belum berhasil memecahkan permasalahan kelompok ekonomi ditingkat bawah. Selain itu, kebijakan dalam negeri seringkali tidak terlepas dengan kondisi diluar negri yang secara tidak langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah, antara lain dari segi pendanaan pembangunan.⁴⁶

⁴⁵Sri Edi Suwarsono, *Sekitar Kemiskinan Dan Keadilan*, Dari Cendikiawan Tentang Islam (Jakarta : Ui Perss ,1987), h. 24.

⁴⁶Lincoln Arsyat, Op.Cit, h. 300.

Menurut pendapat Bagong Suyanto, ada tiga faktor penyebab terjadinya kemiskinan dipedesaan maupun diperkotaan, yaitu:⁴⁷

1. Sepitnya penguasaan dan pemilikan lahan atau akses produksi lain, ditambah lagi kurangnya ketersediaan modal yang cukup untuk usaha.
2. Karena nilai tukar hasil produksi yang semakin jauh tertinggal dengan hasil produksilain, termasuk kebutuhan hidup sehari-hari,.
3. Karena tekanan perangkap kemiskinan dan ketidak tahuan masyarakat, dengan artian mereka terlalu relatif terisolasi atau tidak memiliki akses yang cukup untuk memperoleh informasi-informasi yang dibutuhkan. disamping itu masyarakat secara fisik lemah karena kurang gizi, mudah terserang penyakit dan tidak berdaya atau rentan.

Nanik Sudarwati, mengidentifikasi bahwa golongan miskin dapat dikaitkan dengan permasalahan berikut:⁴⁸

1. Kekurang mampuan dalam meraih peluang ekonomi : peluang kerja, rendahnya upah, malas bekerja dan lain sebagainya.
2. Sumber daya alam yang terbatas serta Penguasaan aset produksi yang rendah : lahan, air, faktor produksi dan jangkauan pelayanan.
3. Kondisi kurang gizi dan kesulitan memenuhi kebutuhan hidup pokok.
4. Mempunyai anak balita yang kurang gizi dan kesehatan yang rendah.
5. Kondisi perumahan tak layak huni atau kumuh.

⁴⁷Faisal Basri, *Perekonomian Indonesia*(Jakarta :Erlangga, 2002), h. 98.

⁴⁸Nanik Sudarwati, *Kebijakan pengentasan kemiskinan mengurangi penanggulangan kemiskinan*(malang : intimedia, 2009), h. 23.

6. Kekurang mampuan menyekolahkan anak.
7. Kebijakan pemerintah yang kurang mendukung serta kurang mampuan meraih pelayanan kesehatan, air bersih dan keserasian lingkungan.

Masalah kemiskinan di Indonesia tidak hanya melanda di Kota saja namun juga di Desa, dimana sebagian besar kemiskinan terjadi di wilayah Desa. Faktor-faktor yang telah dijelaskan diatas merupakan permasalahan yang akan memperparah kondisi perekonomian yang menyebabkan kemiskinan. Salah satu ciri kondisi kemiskinan adalah tidak adanya sarana prasarana yang dibutuhkan serta kuitas lingkungan yang kumuh dan tidak layak huni. Kemiskinan juga mencakup masalah struktural dan multidimensional yang mencakup sosial dan politik.

Hans Dieter dan Suwardi, mengatakan bahwa kemiskinan yang ada di kampung dapat digolongkan baik kemiskinan tempat tinggal maupun kemiskinan penduduk. Kemiskinan tempat tinggal kondisinya sebagai tempat tidak teratur sedangkan kemiskinan penduduk karena ditinjau dari segi sosial dan ekonominya sangat rendah termasuk penyediaan air dan listrik beserta prasarana yang minim.

Pendapat di atas mempunyai penekanan bahwa karakteristik yang ada di daerah perkampungan dapat dilihat dari kondisi perumahan orang-orangnya dan ketersediaan sarana prasarana umum dibutuhkan oleh masyarakat. Dalam proses pembangunan suatu Negara menurut Syahrir

ada tiga macam kemiskinan antara lain miskin karena miskin, kemiskinan ini disebabkan kemiskinan yang merupakan akibat rendahnya tingkat pendidikan, kesehatan kurang memadai, dan kurang terolahnya potensi ekonomi dan seterusnya, Kemiskinan yang sebenarnya tidak perlu terjadi di tengah-tengah kelimpahan atau kemiskinan yang disebabkan oleh buruknya daya beli dan system yang berlaku dan Kemiskinan yang disebabkan karena tidak meratanya serta buruknya perdistribusian produk nasional total.⁴⁹ Berdasarkan pendapat di atas, dapat dipahami bahwa faktor dominan yang menyebabkan terjadinya kemiskinan adalah sempitnya lapangan pekerjaan, rendahnya kualitas sumber daya manusia, sumber daya alam terbatas dan kebijakan pemerintah.

1. Lapangan Pekerjaan

a. Pengertian Lapangan Pekerjaan

Pengertian lapangan pekerjaan erat kaitannya dengan tempat di mana seseorang bekerja. Saat ini sering kita dengar banyak orang yang menganggur artinya tidak punya tempat bekerja, akibatnya dia tidak mempunyai pendapatan serta jumlah pengangguran cukup tinggi menyebabkan beban bagi masyarakat bahkan menimbulkan kemiskinan. Lapangan pekerjaan menggambarkan di sektor-sektor produksi apa atau mana saja para pekerja menyandarkan sumber

⁴⁹Yoghi Citra Pratama, "Analisis Faktot-Faktor yang Mempengaruhi Kemiskinan di Indonesia". Jurnal Bisnis dan Manajemen, Vol. 4 No. 2 (Agustus 2014), h. 214

nafkahnya, jika di lihat dari status pekerjaan menjelaskan kedudukan pekerjaan di dalam pekerjaan yang dimiliki atau dilakukannya. Adapun sebaran menurut jenis pekerjaan menunjukkan kegiatan apa yang dikerjakan oleh pekerja yang bersangkutan. penduduk yang mencari pekerjaan adalah usia kerja yang mampu bekerja,usia angkatan kerja di Negara berkembang 10 tahun dan di negara maju adalah 15 tahun,idealnya seseorang dapat bekerja mencari penghasilan adalah usia di atas 17 tahun. Angkatan kerja di Indonesia kualitasnya masih rendah karena sebagian besar tingkat pendidikannya masih rendah.⁵⁰

Angka pengangguran tiap tahun terus bertambah apalagi saat ini sering terjadi PHK. Terjadinya pengangguran disebabkan oleh tidak adanya lapangan pekerjaan atau lapangan pekerjaan yang mempunyai persyaratan tinggi, sehingga banyak tenaga kerja yang tidak bisa masuk.Akan tetapi ada pula orang yang sudah bekerja tetapi di-PHK.

1. Pengaruh Lapangan Pekerjaan

Sempitnya lapangan pekerjaan atau peluang usaha yang terjadi disuatu wilayah akan menyebabkan banyaknya pengangguran dimana tingkat pertumbuhan angkatan kerja yang cepat dan pertumbuhan lapangan kerja yang relatif lambat

⁵⁰Dumairy, *Perekonomian Indonesia* (Jakarta: Erlangga,1996), h. 81.

menyebabkan struktur ekonomi timpang, artinya struktur ekonomi yang ada di dalam masyarakat secara tidak adil tidak memberikan kesempatan yang sama bagi setiap orang untuk mendapatkan aset ekonomi. Artinya didalam struktur ekonomi ada sekelompok kecil orang memiliki kemampuan mendapatkan aset ekonomi. Kenyataan inilah yang sering membuat ketimpangan semakin parah dan ketidak adilan dibidang ekonomi serta peluang yang diusahakan oleh masyarakat begitu minim yang akan menyebabkan rendahnya pendapatan dan terjadinya pengangguran.⁵¹

1) Rendahnya pendapatan

Kemiskinan meliputi berbagai aspek. Kemiskinan sangat terkait dengan kepemilikan modal, kepemilikan lahan, sumber daya manusia, kekurangan gizi, pendidikan, pelayanan kesehatan, pendapatan per kapita yang rendah, dan minimnya investasi. Masih banyak variable kemiskinan yang melekat pada orang miskin. Dengan begitu, konsep kemiskinan perlu dilihat karena akan sangat berpengaruh bagi program pengurangan kemiskinandidaerah berdasarkan corak dan karakteristik kemiskinan itu sendiri dan penyatuan gerak program pengurangan kemiskinan perku dilakukan,

⁵¹Elly M. Setiadi, Usman Kolip, Op.Cit. h. 818.

mengingat selama ini banyak ukuran-ukuran kemiskinan yang dipakai.

Di Indonesia, ukuran kemiskinan yang terkenal adalah yang dibuat oleh Sayogyo yaitu parameter kemiskinan yang mengukur kemiskinan. Misalnya pengonsumsi beras per kapita per tahun, yaitu di bawah 420 kg bagi daerah perkotaan dan 320 kg bagi daerah pedesaan. Namun, sejak tahun 1979 garis melarat dihilangkan dan kemudian ditambah dengan garis Nyaris Miskin, yaitu untuk daerah pedesaan setara dengan 480 kg per kapita per tahun dan untuk daerah perkotaan setara dengan 720 kg per kapita per tahun. Perbedaan ini dapat kita ketahui karena jumlah penduduk yang berbeda di kedua tempat tersebut. Penduduk di perkotaan mempunyai kebutuhan yang relative lebih banyak dibandingkan penduduk di pedesaan sehingga sangat berpengaruh terhadap pola pengeluaran dimasyarakat.

Selain itu, terdapat juga pandangan lain dalam melihat kemiskinan di Indonesia, misalnya mengukur kemiskinan melalui tingkat pendapatan dan pola waktunya. Kemiskinan juga dapat diukur dengan membandingkan tingkat pendapatan orang dengan tingkat pendapatannya sendiri. Lembaga pengembangan sumber daya manusia mendefinisikan

kemiskinan absolut sebagai ketidakmampuan untuk memenuhi standar minimumkebutuhan hidup.Sementara itu, kemiskinan relatif didefinisikan sebagai ketidak mampuan untuk memenuhi standar hidup sesuai dengan yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Kemiskinan absolut ini umumnya disejajarkan dengan kemiskinan relatif, yang artinya adalah keadaan perbandingan antara kelompok pendapatan dalam masyarakat. Intinya membandingkan antara kelompok yang mungkin tidak miskin dengan kelompok yang relatif kaya dengan menggunakan ukuran pendapatan, keadaan ini dikenal sebagai ketimpangandistribusi pendapatan.

Distribusi pendapatan merupakan masalah perbedaan pendapat antara individu yang paling kaya dengan individu yang paling miskin.Semakin besar jurang pendapatan semakin besar pula variasi dalam distribusi pendapatan.Jika ketidakseimbangan terus terjadi antara kelompok kaya dan kaum miskin, maka perekonomian tersebut benar-benar menggambarkan pertumbuhan yang tidak merata.⁵²

⁵²lincoln Arsyad, Op.Cit. h. 303.

2) Tingkat Pengangguran

Pengangguran merupakan suatu keadaan dimana seseorang yang tergoong dalam kategori angkatan kerja tidak memiliki pekerjaan dan secara aktif sedang mencari pekerjaan. Pengangguran terjadi karena ketidaksesuaian antara permintaan dan penyediaan dalam pasar kerja. Bentuk-bentuk ketidaksesuaian pasar kerja antara lain akan menyebabkan banyaknya macam-macam pengangguran yaitu friksional, musiman, siklikal, struktural dan teknologis. Tingkat pengangguran sangat erat hubungannya dengan laju pertumbuhan penduduk. Laju pertumbuhan yang tinggi akan meningkatkan jumlah angkatan kerja (penduduk usia kerja), besarnya angkatan kerja ini dapat menekan ketersediaan lapangan kerja di pasar kerja. Angkatan kerja terdiri dari dua komponen yaitu orang yang menganggur dan orang yang bekerja. Tingkat pengangguran terbuka di perkotaan hanya menunjukkan aspek-aspek yang tampak dari masalah kesempatan kerja di negara yang sedang berkembang. Apabila mereka tidak bekerja konsekuensinya adalah mereka tidak dapat memenuhi kebutuhan dengan baik, kondisi seperti ini

membawa dampak bagi terciptanya dan membengkaknya jumlah kemiskinan yang ada.⁵³

b. Lapangan Pekerjaan dalam Islam

Dalam islam, pendapatan yang diperoleh dari setiap individu adalah telah ditentukan oleh Allah, dimana ada orang yang diberikan rezki lapang dan ada pula yang dalam kondisi sempit (miskin) dalam surah Al-Israa' Ayat 30 dijelaskan :

إِنَّ رِزْقَ رَبِّكَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا

بَصِيرًا

Artinya :*Sesungguhnya tuhanmu melapangkan rezeki kepada siapa yang dia kehendaki dan menyempitkan-Nya; sesungguhnya dia Maha mengetahui lagi Maha melihat akan hamba-hambanya.*⁵⁴

Penjelasan ayat di atas menunjukkan bahwa adanya perbedaan perolehan harta antara satu manusia dengan lainnya. Bentuk ungkapan ini tidak mempertentangkan antara yang kaya dengan miskin, atau lapang dengan sempit, adanya batasan antara si kaya dengan si miskin akan mengakibatkan adanya strata social yang terjadi di masyarakat jika dilihat

⁵³Sonny Sumarsono, *Teori dan Kebijakan Publik Ekonomi Sumber Daya Manusia* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009), h. 261.

⁵⁴Departemen Agama RI, *Op.Cit* , h. 108.

dari pandangan ekonomi. Tentu saja batasan tersebut adalah bagi manusia yang mampu dalam mencari kesempatan kerja, memiliki skil atau ketrampilan sesuai dengan kerja, mau bekerja keras dan bersungguh-sungguh, tipe manusia yang seperti ini lah yang diberikan kelapangan rizki atau pendapatan oleh Allah SWT.

Peluang usaha dalam islam untuk mendapatkan pekerjaan yang diusahakan oleh manusia telah dianjurkan oleh Allah dimana setiap hambanya yang mau berusaha dan mau bekerja keras pasti akan mendapatkan rezeki darinnnya dan manusia dituntut untu mau berusaha. Penjelasan tentang anjuran untuk bekerja atau mencari peluang yang ada telah dijelaskan dalam surah Al-Jumuu'ah ayat 10 sebagai berikut:

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ
وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٠﴾

Artinnya: *Apabila Telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.*⁵⁵

⁵⁵ *Ibid.* h. 441.

2. Sumber Daya Manusia

a. Pengertian Sumber Daya Manusia

Sumber daya yang berkualitas bagi suatu negara yang sedang berkembang seperti halnya Indonesia, merupakan faktor penting dalam upaya untuk mengejar ketertinggalan pembangunan dengan negara lain. Deolaliker (1997),⁵⁶ menjelaskan bahwa modal manusia untuk menjadi sumber manusia yang andal dalam pembangunan apabila kualitasnya tinggi. Sumber daya manusia memiliki peranan penting dalam meningkatkan kualitas pembangunan dan teknologi yang pada akhirnya dapat menimbulkan kenaikan produktifitas penduduk.

Teori klasik Adam Smith,⁵⁷ sumber daya manusia yang efektif adalah pemula pertumbuhan ekonomi. Setelah ekonomi tumbuh, akumulasi modal fisik baru mulai dibutuhkan agar menjaga ekonomi tumbuh. Dengan kata lain, sumber daya manusia ini merupakan alokasi yang efektif untuk syarat suatu bangsa bisa terus maju. Sumber daya manusia merupakan bagaimana dalam memanfaatkan sumber daya manusia sebaik-baiknya untuk dapat menghasilkan barang dan jasa yang mempunyai nilai ekonomis baik untuk memenuhi kebutuhan pribadi dan masyarakat.⁵⁸

⁵⁶Nurul Huda, dkk, Op.Cit. h.163.

⁵⁷Mulyadi S, *Ekonomi Sumber Daya Manusia dalam Pospek Pembangunan* (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), h. 4.

⁵⁸Sonny Sumrsono, Op.Cit.h. 4.

b. Pengaruh Sumber Daya Manusia

Kualitas sumber daya manusia yang tinggi merupakan modal awal dalam pembangunan suatu negara. Jika kualitas sumber daya manusiannya rendah maka akan menghambat perekonomian dan menjadi faktor penyebab kemiskinan yang terjadi di Indonesia ini. Kualitas sumber daya manusia yang rendah akan menyebabkan taraf hidup yang rendah pula. Kekurangan sumber daya manusia (SDM) merupakan ironi bagi bangsa yang memiliki potensial SDM yang besar. Bagaimanapun pesatnya teknologi, maupun besarnya modal namun jika tidak diiringi dengan kualitas SDM yang baik, terampil dan terlatih, maka semua hal itu akan menjadi sia-sia. Tersediannya barang modal yang canggih hanya akan efektif jika digunakan oleh tenaga-tenaga yang terampil dan terlatih, sehingga akan meningkatkan produktivitas tenaga kerja dan akan meningkatkan pendapatan. Mengatasi masalah SDM merupakan tantangan yang berat serta membutuhkan waktu yang lama dalam pembangunan ekonomi. Oleh karena itu perlu melihat secara riil sejauh mana pembangunan sumber daya manusia di Indonesia sebagai modal untuk meningkatkan ekonomi masyarakat Indonesia, yang dapat dilihat melalui indikator indeks pembangunan manusia/ *Human Development Indeks* (HDI).

Secara implisit HDI menegaskan adanya kondisi hubungan antara kondisi pendidikan dan kesehatan dengan tingkat pertumbuhan

ekonomi suatu negara, karena secara konseptual, HDI memadukan tiga komponen utama yakni⁵⁹:

1) Kualitas hidup

yaitu yang diwakili oleh indikator tingkat pertumbuhan ekonomi (GDP) perkapita pertahun. Peningkatan kualitas hidup yaitu meliputi kualitas manusiannya seperti jasmani dan rohani serta kemampuan kualitas hidupnya seperti perumahan dan pemukiman yang sehat.

2) Kondisi kesehatan

kondisi kesehatan penduduk yang diwakili oleh indikator usia harapan hidup, kualitas kesehatan juga dilihat dari angka kematian bayi yang cukup besar dibanding angka kelahiran bayi merupakan salah satu indikator untuk mengukur derajat kesehatan masyarakat.⁶⁰Kesehatan merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya. Dalam membandingkan tingkat kesejahteraan antar kelompok masyarakat sangatlah penting untuk melihat angka harapan hidup. Di negara-negara yang tingkat kesehatannya lebih baik, setiap individu memiliki rata-rata hidup lebih lama, dengan

⁵⁹Ruslan Abdul Ghofur Noor, *Konsep Distribusi dalam Ekonomi Islam*(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), h. 150.

⁶⁰Sonny Sumarsono, *Op.Cit.* h.175.

demikian secara ekonomis mempunyai peluang untuk memperoleh pendapatan lebih tinggi.

3). Tingkat pendidikan

Pendidikan merupakan peranan yang sangat penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia secara keseluruhan serta menjadi salah satu sarana untuk meningkatkan potensi dasar yang dimiliki masyarakat. Pada dasarnya jenis dan tingkat pendidikan dianggap dapat mewakili kualitas sumber daya manusia. Pendidikan adalah salah satu proses yang bertujuan untuk menambah keterampilan, pengetahuan dan meningkatkan kemandirian maupun pembentukan kepribadian seseorang individu. Hal-hal yang melekat padadiri orang tersenut merupakan modal dasar yang dibutuhkan untuk melaksanakan pekerjaan. Jenjang di Indonesia yang dipakai oleh BPS adalah: tidak sekolah, tidak lulus sekolah, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, program diploma dan universitas. Makin tinggi nilai aset maka makin tinggi pula kemampuan mereka untuk bekerja. Pada umumnya seseorang yang berpendidikan rendah akan berpenghasilan yang rendah atau tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sosial yang harus dipenuhi. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang maka semakin tinggi tingkat keahliannya,

sehingga perusahaan tempatnya bekerja memperoleh keuntungan dari hasil yang dikerjakan dan akan memberikan bayaran yang mahal. Dan semakin sejahteralah hidup mereka yang berpendidikan tinggi. Sangat berbeda bagi mereka yang berpendidikan rendah, dengan keahlian yang dimiliki sangat minim sehingga jarang ada perusahaan yang mau untuk menerima bekerja. Kondisi pendidikan yang diwakili oleh tingkat melek buta huruf dan partisipasi pendidikan/sekolah merupakan batasan dalam pendidikan dimana jika disuatu daerah masih banyak yang tidak bisa membaca atau partisipasi untuk bersekolah kurang maka dapat diidentifikasi jika diwilayah tersebut masih banyak yang berpenghasilan dibawah rata-rata.⁶¹

c. Sumber Daya Manusia dalam Islam

Manusia diciptakan oleh Allah SWT dalam rangka menjadi khalifah dimuka bumi, hal ini banyak dicantumkan dalam Al-Qur'an dengan maksud agar manusia dengan kekuatan yang dimilikinya mampu membangun dan memakmurkan bumi ini diperlukan proses yang panjang. Penciptaan manusia sebagai makhluk Allah SWT, dan juga termasuk sebagai sumber daya manusia islami. Manusia

⁶¹Sonny Sumarsono, *Ibid*, h. 58.

diciptakan dengan sebaik-baik bentuk. Sebagaimana dalam firman Allah SWT dalam surat At-Tiin: 4 yaitu:

تَقْوِيمًا حَسَنًا فِي الْإِنْسَانِ خَلَقْنَا لَقَدْ

Artinya: *Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya.*⁶²

Hadits diatas dapat penulis simpulkan yang dimaksud dengan sumber daya manusia islami adalah dimana manusia itu sendiri memiliki iman yang kuat mau berusaha dan bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan hidup untuk mengurangi kemiskinan. Pembangunan manusia dalam islam tentuannya harus memperhatikan dua potensi yakni lahiriah sebagai tubuh itu sendiri dan ruhaniyah sebagai pengendali tubuh. Pendidikan dalam islam memandang tinggi masalah SDM ini khususnya yang berkaitan dengan akhlak (sikap, pribadi, etika dan moral), agar manusia dalam menjalankan kehidupannya terutama dalam menjalankan aktifitas ekonomi sesuai dengan Al-Qur'aan dan Sunnah Rasulullah SAW. oleh karenanya sumber daya manusia islam, karena potensi yang ada dalam diri manusia islam tersebut dapat membawakan kepada kesejahteraan bagi perusahaan saat mereka beribadah (berkerja).⁶³

⁶²Departemen Agama RI, *Op.Cit.* h. 478.

⁶³<http://hendrakholid.net/blog/2009/12/10/manajemen-sumber-daya-insani,26-04-2017>

3. Sumber Daya Alam

a. Pengertian Sumber Daya Alam

Sumber daya alam adalah faktor produksi atau merupakan input bagi perusahaan dan kegiatan ekonomi. Semakin maju suatu perekonomian secara absolut semakin banyak jumlah dan macam-macam sumber daya alam yang di olah, sehingga berubah dari sumber daya alam yang potensial menjadi sumber daya alam yang riil sifatnya.

Istilah sumber daya alam tidak menunjukkan suatu zat atau barang yang ada di alam sekitar, tetapi menunjukkan fungsi-fungsinya di dalam memuaskan kebutuhan tertentu bagi manusia. Jadi konsep sumber daya alam adalah mencerminkan penafsiran atau penilaian manusia dalam hubungannya dengan kebutuhan-kebutuhan. Oleh karena itu sumber daya alam tidak hanya mencakup tanah, air, udara, hutan dan mineral, tetapi juga lingkungan hidup.⁶⁴

b. Pengaruh Sumber Daya Alam

Peran sumber daya alam hubungannya dengan pertumbuhan ekonomi merupakan masalah yang dialami oleh negara-negara yang sedang berkembang ialah sumber daya alam yang belum banyak diusahakan, sehingga masih bersifat potensial. Sumber-sumber alam

⁶⁴Irawan dan M. Suparmoko, *Ekonomika Pembangunan*, edisi enam (Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 2002), h. 162.

ini belum dapat menjadi sumber yang rill, karena kurangnya kapital, tenaga ahli dan wirausaha.⁶⁵

Menurut Shirley Walter Allen,⁶⁶ dapun macam sumber daya alam dapat digolongkan menjadi tiga:

- 1). Sumber daya alam yang tidak dapat habis. Ini mencakup udara, air hujan dan matahari.
- 2). Sumber daya alam yang dapat diganti atau diperbarui dan dipelihara. Ini meliputi air yang ada di tempat seperti danau, sungai dan sebagainya, kualitas tanah, hutan, margasatwa.
- 3). Sumber daya alam yang tidak dapat diganti. Ini mencakup sumber daya mineral seperti logam, minyak bumi dan batu bara.

Terbatasnya sumber daya alam disuatu negara maka akan mengakibatkan tidak adanya perkembangan ekonomi. Alam sekitarnya akan membatasi kemungkinan usaha-usaha manusia untuk hidup dan mencapai sesuatu. Semakin maju suatu perekonomian secara absolute semakin banyak jumlah dan macam sumber daya alam yang diolah sehingga dapat berubah sumber daya alam yang potensial menjadi sumber daya alam yang rill sifatnya. Namun, pengolahan sumber daya alam haruslah tetap hati-hati baik sumber daya alam sifatnya terbatas

⁶⁵*Ibid.*h. 159.

⁶⁶*Ibid.*h. 164.

dan tidak dapat diperbaharui maupun sumber daya alam yang dapat diperbaharui.

c. Sumber Daya Alam dalam Islam

Dalam islam telah dijelaskan dalam surah Al-Jasiyah ayat 13 sebagai berikut:

وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ
لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿١٣﴾

Artinya: *Dan dia Telah menundukkan untukmu apa yang di langit dan apa yang di bumi semuanya, (sebagai rahmat) daripada-Nya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi kaum yang berfikir.*⁶⁷

Hadits diatas telah menjelaskan bahwa Allah telah menjadikan sumber daya alam dan lingkungan sebagai daya dukung lingkungan bagi kehidupan manusia, Yang demikian hanya ditangkap oleh manusia yang punya akal pikiran ataupun nalar. dalil diatas merupakan pondasi dari teori pengelolaan sumber daya manusia yaitu manusia ditugaskan sebagai khalifah dimuka bumi adalah untuk memelihara lingkungan hidup dengan tetap mendekatakan diri kepada allah. Penjelasan selanjutnya yaitu islam mengajarkan umatnya untuk selalu

⁶⁷Departemen Agama Ri, *Op.Cit.* h. 398.

menjaga lingkungan dan tidak membuat kerusakan lingkungan yaitu dalam surah Al-A'raaf ayat 56:

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

Artinya: *Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (Tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik.*⁶⁸

4. Kebijakan Pemerintah

a. Pengertian Kebijakan Pemerintah

Kebijakan pemerintah pada prinsipnya dibuat atas dasar kebijakan yang bersifat luas. Dalam bidang perekonomian, pemerintah mengatur sebaik-baiknya dan berinteraksi secara efektif sehingga menghasilkan pertumbuhan ekonomi dengan laju pertumbuhan yang tinggi. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi mencerminkan kondisi kesejahteraan rakyat yang tinggi.

Kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah yaitu untuk mengatur negara. Sesuai dengan sistem administrasi negara, kebijakan dapat dibagi menjadi dua, yaitu kebijakan internal yaitu kebijakan

⁶⁸Departemen Agama Ri, *Op.Cit.* h. 119.

yang mempunyai kekuatan mengikat aparatur dalam organisasi pemerintah sendiri. Kedua, kebijakan eksternal yaitu kebijakan yang mengikat masyarakat umum, sehingga dengan kebijakan demikian kebijakan ini harus tertulis.⁶⁹

b. Pengaruh Kebijakan Pemerintah

Pemerintah memiliki posisi yang sangat penting dalam menciptakan keadilan disuatu negara utuk bisa mencukupi kebutuhan demi mensejahterakan rakyat. Jika pemerintah kurang peka terhadap laju pertumbuhan ekonomi masyarakat miskin dapat menjadi salah satu fator kemiskinan.Pemerintah tidak dapat memutuskan kebijakan yng mampu mengendalikan tingkat kemiskinan dinegarannya.⁷⁰

Struktur politik yang menyangkut rendahnya kualitas kebijakan pemerintah dalam menata struktur ekonomi negara. Dimana, berbagai laporan ekonomi pendapatan nasional dari tahun ketahun selalu mengalami peningkatan hanyalah berupa data-data kuantitatif. Akan tetapi rakyat selalu dibayang-bayangi dengan oleh berbagai kebijakan ekonomi yang tidak memihak kepadanya. Optimisme pendapatan nasional yang terus meningkat yang selalu didengungkan ternyata berlawanan dengan kenyataan yang ada dimana sektor rill tidak

⁶⁹Rahardjo Adisasmita, *Teori-Teori Pembangunan Ekonomi* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), h. 119.

⁷⁰Ruslan Abdul Ghofur Noor, *Op.Cit.* h. 89.

mengalami perkembangan yang berarti. Kondisi inilah yang disebut dengan indikator rendahnya kualitas kebijakan politik pemerintah.⁷¹

c. Kebijakan Pemerintah dalam Islam

Pentingnya peran pemerintah dalam menciptakan kesejahteraan, pada dasarnya terlebih dahulu diperhatikan oleh Islam, yang dapat dilihat dalam tindakan Rasulullah saat menyandingkan kaum Muhajirin dan Anshar dalam ikatan persaudaraan. Tindakan tersebut secara langsung, mendeklarasikan bahwa negara menjamin bagi setiap individu taraf hidup layak. Islam menetapkan prinsip-prinsip jaminan sosial secara jelas yang diaplikasikan dalam bentuk jaminan individu, keluarga dan masyarakat.⁷²

Islam mengajarkan, sesungguhnya seorang imam (pemimpin) diproyeksikan untuk mengambil alih peran nubuwwah (kenabian) dalam menjaga agama dan mengatur dunia. Pemberian jabatan imamah (kepemimpinan) kepada orang yang menjalankan tugas di atas pada umat adalah wajib berdasarkan ijma' ulama. Pengangkatan pemimpin hukumnya wajib berdasarkan akal, sebab orang yang berakal akan tunduk kepada imamnya yang melindungi mereka dari segala bentuk ketidakadilan, memusnahkan konflik dan permusuhan yang terjadi di antara mereka. Tanpa imam manusia akan berada dalam keadaan

⁷¹Elly M. Setiadi, Usman Kolip, *Op.Cit.* h. 800.

⁷²Ruslan Abdul Ghofur Noor, *Op.Cit.* h. 95.

choas, dan menjadi manusia yang tidak diperhitungkan bangsa lain. Pemimpin juga harus didasari oleh syariat, karena imam bertugas untuk mengurus urusan agama serta setiap orang harus bisa melindungi diri dari ketidakadilan dalam pelayanan dan komunikasi. Karakteristik kepemimpinan dalam Islam haruslah memiliki sifat bertakwa, berpengetahuan luas, adil, jujur, konsekuen dan bertanggung jawab.⁷³

Allah berfirman dalam surah An-Nisaa ayat 59:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

Artinya : *Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.*⁷⁴

⁷³Lukman Hakim, Prinsip-prinsip Ekonomi Islam, (Bandung: Penerbit Erlangga, 2012), h. 207-210.

⁷⁴Departemen Agama RI, *Op.Cit.* h. 61.

5. Kriteria Atau Cirri-Ciri Kemiskinan

Beberapa cirri yang melekat pada penduduk miskin yaitu: (1) pendapatan manusia rendah atau tidak berpendapatan, (2) tidak memiliki pekerjaan tetap, (3) pendidikan rendah bahkan tidak berpendidikan, (4) tidak memiliki tempat tinggal, (5) tidak terpenuhinya standar gizi minimal.⁷⁵

Menurut BKKBN, kriteria keluarga yang dikategorikan sebagai keluarga miskin adalah keluarga pra-sejahtera (pra-KS) dan keluarga sejahtera I (KS I). ada lima indikator yang harus dipenuhi agar suatu keluarga dikategorikan sebagai keluarga sejahtera I, yaitu sebagai berikut:⁷⁶

- 1) Anggota keluarga melaksanakan ibadah sesuai agama yang dianut masing-masing.
- 2) Seluruh anggota keluarga pada umumnya makan 2 kali sehari atau lebih.
- 3) Seluruh anggota keluarga mempunyai pakaian yang berada di rumah, sekolah, bekerja dan bepergian.
- 4) Bagian terluas lantai rumah bukan dari tanah.
- 5) Bila anak sakit atau PUS (Pasang Usia Subur) ingin mengikuti KB pergi ke sarana/petugas kesehatan serta diberi cara KB modern.

Keluarga yang dikategorikan masuk dalam keluarga pra sejahtera apabila tidak memenuhi salah satu dari 5 indikator diatas. Apabila memenuhi ke lima indikator tersebut maka dikategorikan keluarga sejahtera

⁷⁵ Triwahyuni Rejekiningsih, Identifikasi Factor Penyebab Kemiskinan Di Kota Serang Dari Dimensi Cultural, *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, Vol. 72, No. 1, (Juni 2011), h. 34.

⁷⁶ Badan Pusat Statistic, H. 15.

I.77 dengan demikian, jika ada anggota melebihi dari kelima indikator tersebut maka keluarga tersebut dikategorikan keluarga yang sudah sejahtera dan dikategorikan keluarga kaya.

Sedangkan menurut BPS mengkategorikan karakteristik kemiskinan sebagai berikut:⁷⁸

1. Luas lantai bangunan tempat tinggal kurang dari 8m² per orang.
2. Jenis lantai tempat tinggal terbuat dari tanah / bambu / kayu murahan.
3. Jenis dinding tempat tinggal dari bambu / rumbia / kayu berkualitas rendah / tembok tanpa diplaster.
4. Tidak memiliki fasilitas buang air besar / bersama-sama dengan rumah tangga lain.
5. Sumber penerangan rumah tangga tidak menggunakan listrik.
6. Sumber air minum berasal dari sumur mata air tidak terlindung / sungai/air hujan.
7. Bahan bakar untuk memasak sehari-hari adalah kayu bakar / arang / minyak tanah.
8. Hanya mengkonsumsi daging / susu / ayam dalam satu kali seminggu.
9. Hanya membeli satu stel pakaian baru dalam setahun.
10. Hanya sanggup makan sebanyak satu / dua kali dalam sehari.

⁷⁷*Ibid*, h. 16.

⁷⁸Criteria Miskin Menurut Standar BPS” (On-Line). Tersedia Di: [Http://KeluargaHarapan.Com/14-Kriteria-Miskin-Menurut-Standar-Bps/2](http://KeluargaHarapan.Com/14-Kriteria-Miskin-Menurut-Standar-Bps/2) Oktober 2016).

11. Tidak sanggup membayar biaya pengobatan di puskesmas / poliklinik.
Sumber penghasilan kepala rumah tangga adalah: petani dengan luas lahan 500m², buruh tani, nelayan, buruh bangunan, buruh perkebunan dan atau pekerja lainya dengan pendapatan dibawah Rp. 600,00,- per bulan.
12. Pendidikan tertinggi kepala rumah tangga : tidak sekolah / tidak tamat SD / tamat SD.
13. Tidak memiliki tabungan / barang yang mudah dijual dengan minimal Rp. 500.000,- seperti sepeda motor kredit / non kredit, emas, ternak, kapal motor, atau barang modal lainya.

6. Pengentasan Kemiskinan

Menurut penelitian Siti Mubaroqah, menjelaskan bahwa pengentasan kemiskinan ada 4 macam, diantaranya yaitu:⁷⁹

1. Pemberdayaa Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat merupakan suatu prosedi mana masyarakat, khususnya mereka yang kurang memiliki akses kesumber daya pembangunan, didorong untuk meningkatkan kemandiriannya di dalam mengembangkan peri kehidupan mereka. Pemberdayaan masyarakat juga merupakan proses siklus terus-menerus, proses partisipatif di mana anggota masyarakat bekerja sama dalam kelompok

⁷⁹Siti Mubaroqah, "Implementasi Program Pembangunan Rumah Layak Huni Di Desa Sangatta Utara Tahun 2014", Jurnal Ilmu Pemerintah, Vol. 3, No, 2,(2015), h. 5.

formal maupun informal untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman serta berusaha mencapai tujuan bersama. Jadi, pemberdayaan masyarakat lebih merupakan suatu proses.

2. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri adalah program nasional penanggulangan kemiskinan terutama yang berbasis pemberdayaan masyarakat. PNPM Mandiri adalah program nasional dalam wujud kerangka kebijakan sebagai dasar dan acuan pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat.

PNPM Mandiri dilaksanakan melalui harmonisasi dan pengembangan system serta mekanisme dan prosedur program, penyediaan pendampingan dan pendanaan stimulant untuk mendorong prakarsa dan inovasi masyarakat dalam upaya penanggulangan kemiskinan yang berkelanjutan.

Upaya lain pula yang di lakukanya kini melalui pemberdayaan masyarakat untuk menciptakan atau meningkatkan kapasitas masyarakat, baik secara individu maupun berkelompok, dalam memecahkan berbagai persoalan terkait upaya peningkatan kualitas hidup, kemandirian dan kesejahteraannya. Pemberdayaan masyarakat memerlukan keterlibatan yang besar dari perangkat pemerintah daerah serta berbagai pihak untuk

memberikan kesempatan dan menjamin keberlanjutan berbagai hasil yang dicapai.

3. PNPM Mandiri Perdesaan

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM Mandiri Perdesaan atau PNPM-Perdesaan atau PNPM-Rural) merupakan salah satu program pemberdayaan masyarakat yang mendukung PNPM mandiri yang wilayah kerja dan target sasaran adalah masyarakat perdesaan yang berdasar pada UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional. PNPM Mandiri Perdesaan mengadopsi sepenuhnya mekanisme dan prosedur Program Pengembangan Kecamatan (PPK) yang telah dilaksanakan sejak 1998-2007.

PNPM Mandiri Perdesaan ini sebagai salah satu program pemberdayaan masyarakat yang dalam pelaksanaannya, program ini memprioritaskan kegiatan bidang infrastruktur desa, pengelolaan dana bergulir bagi kelompok perempuan, kegiatan pendidikan, perumahan dan kesehatan bagi masyarakat di wilayah perdesaan. Program ini terdiri dari tiga komponen utama, yaitu, dana BLM (Bantuan Langsung Masyarakat) untuk kegiatan pembangunan, Dana Operasional Kegiatan (DOK) untuk kegiatan perencanaan pembangunan partisipatif dan kegiatan pelatihan masyarakat (*capacity building*) serta pendampingan masyarakat yang

dilakukan oleh para fasilitator pemberdayaan, fasilitator teknik dan fasilitator keuangan.

4. Pembangunan Rumah Layak Huni

Didalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan terdapat program pembangunan rumah layak huni. Hal ini sejalan dan mengacu pada mekanis pelaksanaan PNPM Mandiri karena salah satu kebutuhan primer bagi manusia adalah terpenuhinya kebutuhan akan tempat tinggal (rumah) yang layak dan sehat. Pembangunan Rumah Layak Huni memfokuskan pendekatan pelaksanaan padaprinsip-prinsip PNPM-MPd yaitu pembangunan partisipatif, transparan, sederhana dan akuntabel.

Strategi PNPM-MP untuk pembangunan Rumah Layak Huni masyarakat perdesaan akan dilakukan dengan mendorong dan memberikan bantuan berupa Dana Bantuan Langsung Masyarakat dan Tenaga konsultan pendamping.

Pelaksanaan kegiatan yang berbasis masyarakat diutamakan secara swakelola dan padat karya yang menjadi prioritas dengan tujuan gotong royong agar bias tetap terjaga sekaligus masyarakat dapat memperoleh pendapatan. Dan dari program yang diterima anggota masyarakat sebagai upah kerja atau transaksi bahan material dan lain-lain, diharapkan sekaligus memicu produksi dan konsumsi bagi pemulihan ekonomi masyarakat.

7. Kemiskinan dalam Perspektif Islam

a. Definisi Kemiskinan

Kemiskinan merupakan masalah yang sangat kompleks yang sangat tidak dianjurkan oleh Islam. Islam melarang kepada umatnya untuk meninggalkan keluarganya dalam keadaan lemah dan miskin sesuai dengan firman Allah dan QS. An Nisa' sebagai berikut :

وَلْيَخَشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا
 اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٩﴾

“Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan Perkataan yang benar.” (QS. An Nisa’ : 9)⁸⁰

Kemiskinan merupakan sebuah konsep multidimensi yang sulit untuk didefinisikan secara tunggal. Banyak pakar dalam berbagai disiplin ilmu untuk mendefinisikannya.⁸¹

Kemiskinan dalam perspektif Islam sesungguhnya memiliki sedikit pemahaman yang berbeda dengan kemiskinan secara konvensional. Islam mendefinisikan kemiskinan kedalam dua kategori

⁸⁰Kementerian Agama Republik Indonesia, *Loc. Cit*, h. 78.

⁸¹Irfan Syauqi, *Loc Cit*, h.68

yaitu fakir dan miskin.⁸² Definisi fakir menurut mazhab Syafii dan Hambali yaitu orang yang tidak memiliki penghasilan sekali karena ada sebab khusus yang syar'i (*uzur syar'i*), seperti usia tua, serta sibuk dalam dakwah sehingga tidak sempat untuk mencari nafkah.⁸³ Seperti yang tercantum pada QS. Al Baqarah (273) :

لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي
 الْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ لَا
 يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِحْفَافًا ۗ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَالِمٌ



“(Berinfaqlah) kepada orang-orang fakir yang terikat (oleh jihad) di jalan Allah; mereka tidak dapat (berusaha) di bumi; orang yang tidak tahu menyangka mereka orang Kaya Karena memelihara diri dari mintaminta. kamu kenal mereka dengan melihat sifat-sifatnya, mereka tidak meminta kepada orang secara mendesak. dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan (di jalan Allah), Maka Sesungguhnya Allah Maha Mengatahui.”(QS. Al Baqarah : 273)⁸⁴

Sedangkan pengertian orang miskin menurut mazhab Syafii dan Hambali adalah orang yang tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup diri

⁸²An Nisaa’ Siti Humanira, *Kredit Berbasis Islam dalam Mengentaskan Kemiskinan (Studi Kasus : Grameen Bank, Bangladesh)*. Jurnal The Moslem Planners #1, April-Mei : 2013.

⁸³Irfan Syauqi, *Loc Cit*, h.72

⁸⁴Kementerian Agama Republik Indonesia, *Op. Cit*, h. 72.

dan keluarganya meskipun ia memiliki pekerjaan dan penghasilan. Hal ini didasarkan pada QS. Al Kahfi sebagai berikut:

أَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسْكِينٍ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَهَا وَكَانَ

وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا ﴿٧٩﴾

“Adapun perahu itu adalah milik orang-orang miskin yang bekerja di laut, aku bermaksud merusaknya, karena dihadapan mereka ada seorang raja yang merampas setiap perahu.” (QS. Al Kahfi : 79)

Menurut Al Ghozali kemiskinan adalah ketidakmampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Ketidakmampuan memnuhi apa yang tidak dibutuhkan bukan merupakan kemiskinan. Al Ghazali membagi kemiskinan menjadi dua bagian yaitu kemiskinan dalam kaitannya dengan kebutuhan material dan kemiskinan yang berkaitan dengan kebutuhan rohani atau spiritual. Hal tersebut juga didukung oleh pendapat yang mengatakan bahwa kemiskinan bukan hanya merupakan perampasan barang dan jasa, akan tetapi juga kurangnya kemiskinna dalam roh. Rehman juga berpendapat bahwa umat Islam dapat meningkatkan kehidupan rohani mereka dengan meningkatkan kehidupan material mereka. Selanjutnya, Chapra berpendapat bahwa Islam menjadi agama keseimbangan, telah memberikan penekanan yang sama pada kedua spiritual dan duniawi.

b. Kebutuhan Dalam Prioritas Pemenuhannya

Kebutuhan manusia dalam konsumsi sebenarnya memiliki tingkat urgensi yang tidak selalu sama. Terdapat perioritas diantara satu dengan yang lainnya yang menunjukkan tingkat kemanfaatan dan kemendesakan dalam pemenuhannya. Menurut Almanan terdapat tiga jenis kebutuhan yaitu:⁸⁵

1) Daruriyyah (kebutuhan primer)

Suatu kebutuhan yang wajib dipenuhi dengan segera, jika diabaikan maka akan menimbulkan resiko yang membahayakan eksistensi manusia. Seperti kebutuhan makan dan minum, jika tidak terpenuhi maka dapat menyebabkan kemadaratan bagi kesehatan.

2) Hajjiyah (kebutuhan sekunder)

Kebutuhan jika dipenuhi akan meningkatkan efisiensi, efektifitas dan nilai tambah bagi aktivitas manusia. Jika kebutuhan ini tidak terpenuhi maka tingkat efisiensinya akan berkurang dan membahayakan eksistensi manusia. Seperti kebutuhan makan dalam jumlah yang cukup dalam gizi/vitamin, tempat tinggal yang sehat dan memadai.

3) Tahsiniyyah (kebutuhan tersier)

Kebutuhan jika dipenuhi akan meningkatkan kepuasan dan kenikmatan, meskipun tidak menambah efisiensi ataupun efektifitas

⁸⁵Muhammad Abdul Manan, *Ekonomi Islam: teori dan praktik*, (Diterjemahkan oleh potan Arip Harahap, Intermasa, Jakarta, 1992), h. 48.

dan nilai tambah bagi aktivitas manusia. Misalnya mengkonsumsi makanan sesuai dengan apa yang diinginkan, dan memiliki rumah yang indah dan besar.

Seorang muslim harus mengalokasikan anggarannya secara urut sesuai dengan tingkatan prioritasnya secara konsisten. Kebutuhan pada tingkat pertama harus dipenuhi, baru kemudian kebutuhan yang kedua dan ketiga. Konsumsi setelah dari ketiga ini diperkenankan akan tetapi tetap sesuai dengan syariat Islam.⁸⁶

B. Program Bantuan Rumah Layak Huni

1. Pengertian Program Bantuan Rumah Layak Huni

Menurut sulistyono, mudji, (2013) rumah merupakan kebutuhan dasar manusia. Yang berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga. Pada hakikatnya setiap warga masyarakat membutuhkan perumahan yang layak huni, namun dalam kenyataannya pemenuhan kebutuhan rumah layak huni tersebut menjadi masalah bagi sebagian masyarakat.⁸⁷

Masalah kemiskinan merupakan masalah sosial yang masih banyak dialami oleh penduduk Kabupaten Mesuji. Berdasarkan kriteria yang

⁸⁶M.B. Hendri Anto, *Pengantar ekonomika mikro islami* (Jalasutra: Yogyakarta, 2003). h. 132.

⁸⁷Ika Desiana, “Kemampuan Masyarakat Miskin Memenuhi Persyaratan Bantuan Stimulant Bedah Rumah Studi Kasus Di Desa Labuhan Makmur, Kecamatan Way Serdang, Kabupaten Mesuji, *Sekripsi Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik* (2016) ,h. 30.

digunakan oleh BPS, untuk mengukur kemiskinan bahwa kondisi rumah rumah yang tidak layak huni merupakan cirri utama untuk membedakan keluarga miskin dan keluarga tidak miskin.

Atas dasar pemikiran tersebut diatas, penyebab rumah layak huni atau pemugaran rumah tidak layak huni dapat memberikan kontribusi terhadap upaya penurunan angka kemiskinan. Program Bantuan Rumah Layak Huni (Barulahu) yang di gagas oleh pemerintah kabupaten Mesuji merupakan menyederhanakan dari 14 kriteria yang digunakan BPS menjadi 4 kriteria diantaranya: kondisi rumah tidak permanen dan rusak, dinding dan atap terbuat dari bahan yang mudah rusak, lantai yang masih tanah, serta keluarga yang belum memiliki tempat tinggal. Dengan demikian angka tersebut diatas tidak serta merta akan mendapatkan pelayanan secara keseluruhan, namun secara selektif akan digunakan kriteria yang lebih sederhana namun lebih tepat sasaran. Program tersebut tidak lepas dari aspek program pembangunan Sai Bumi Serasan Segawe.

Pelaksanaan program bantuan rumah layak huni memiliki korelasi positif dalam pengentasan kemiskinan yang merupakan tujuan utama dari program Sai Bumi Serasan Segawe (Satu Bumi Satu Tujuan) dalam melaksanakan program bantuan rumah layak huni secara serentak.

2. Tujuan, Sasaran Dan Karakteristik Program Bantuan Rumah Layak Huni

a. Tujuan

Untuk memenuhi kebutuhan dasar terutama perumahan sebagai tempat tinggal, melalui peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat dan perbaikan/rehabilitas rumah tidak layak huni, sehingga keluarga miskin dapat menempati rumah yang layak huni dalam lingkungan yang sehat dan sejahtera. Sasaran Program

Sasaran program bantuan rumah layak huni adalah keluarga rumah tangga miskin dengan kriteria sebagai berikut:

- 1) Penduduk Kabupaten Mesuji yang memiliki KTP dan sudah menetap secara terus menerus minimal 3 tahun.
- 2) Kepala keluarga yang tidak memiliki penghasilan dan tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar secara layak.
- 3) Status tanah dan rumah yang ditempati adalah milik sendiri, dengan dibuktikan dengan surat kepemilikan yang sah.
- 4) Atap rumah dalam kondisi rusak atau terbuat dari daun, dinding rumah dalam kondisi rusak atau tidak layak dan lantai dalam keadaan rusak atau kondisi lantai dari tanah, serta luas lantai kurang dari 8 m² per-orang dan tidak memiliki MCK.

3. Mekanisme Peyalura Bantuan Rumah Layak Huni

- a. Dinas sosial menyampaikan bantuan berupa bahan bangunan yang disesuaikan dengan ebutuhan, melalui pihak ketiga (rekan) kepada kepala keluarga yang rumahnya dinyatakan lolos seleksi dengan ditandai atau ditempel stiker.
- b. Bantuan bahan bangunan diserahkan langsung kepada penerima bantuan di tempat masing-masing yang pengerjaanya dilaksanakan secara swakelola dan diawasi langsung oleh pendamping teknis yang telah ditunjukan.

4. Pendamping Pelaksana

Pendamping adalah petugas lapangan yang memiliki kepedulian terhadap keluarga miskin berumah tidak layak huni yang didasarkan pada persyaratan yang telah ditetapkan untuk melaksanakan tugas pendamping dalam pelaksanaan Program Bantuan Rumah Layak Huni, (seperti PSM: Pekerja Sosial Masyarakat, atau TKSM; Tenaga Kesejahteraan Masyarakat, Karang Taruna, Masyarakat dan lain-lain).

5. Pengawas

Pengawas dapat dilakukan langsung oleh masyarakat dalam rangka untuk mengetahui ketepatan sasaran, kebenaran pemanfaatan bantuan.

C. Kajian Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai program bantuan rumah layak huni dan pengentasan

kemiskinan telah dilakukan oleh beberapa penulis sebelumnya, hasil dari beberapa penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

1. Siti mubaroqah, implementasi program pembangunan rumah layak huni di desa sanggatan utara tahun 2014. Dipublikasikan sebagai jurnal pemerintahan, Vol. 3 No. 2. 2015. Metode analisis ini menggunakan Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan yang terdiri dari observasi, wawancara dan dokumentasi, sedangkan informan diambil secara purposive sampling. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif dan akan di analisis secara kualitatif. Dan hasil penelitian diketahui bahwa Implementasi Program Pembangunan Rumah Layak Huni di Desa Sangatta Utara Tahun 2014 hasilnya cukup baik dengan melalui proses panjang dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan yang dilakukan oleh pelaku didesa, kecamatan hingga kabupaten dan masyarakat penerima manfaat. Dengan adanya perubahan yang signifikan dari rumah masyarakat penerima manfaat adanya Program Pembangunan Rumah Layak Huni Tahun 2014.
2. Ika Desiana, kemampuan masyarakat miskin memenuhi persyaratan bantuan stimulant bedah rumah (Studi kasus di desa labuhan makmur, kecamatan way serdang, kabupaten Mesuji), metodologi yang di gunakan peneliti ini adalah dengan teknik purposive sampling, dan hasil penelitian

ini bahwa program stimulasi bedah rumah belum sepenuhnya mencapai keberhasilan dikarenakan ada beberapa masyarakat miskin di desa labuhan makmur yang belum mendapatkan bantuan tersebut. Peneliti ini cenderung melihat pada persyaratan pengambilan bantuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah kabupaten Mesuji dalam pencapaian keberhasilan program stimulant bedah rumah.

3. Lawungni nastiti, implementasi program rehabilitas rumah tidak layak huni dikabupaten magenta tahun 2014 (ilmu pemerintahan fisip undip, semarang, metodologi yang di gunakan dalam penelitian ini adalah metode gabungan antara kualiltatif dan kuantitatif dengan metode deskriptif. Hasil dari penelitian ini adalah Implementasi Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni ini pada prakteknya sudah berjalan cukup baik karena pelaksanaan di sebagian besar desa berhasil memperbaiki beberapa komponen rumah seperti atap, lantai, dinding, dan jamban.

BAB III

LAPORAN HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Gambaran Umum Kecamatan Mesuji

Kecamatan Mesuji adalah merupakan salah satu kecamatan dari kecamatan yang ada di Kabupaten Mesuji. Dengan luas wilayah seluruhnya 6.737 Km² dari 11 desa dengan jumlah penduduk yaitu 46.372 jiwa yang terdiri dari 12.044 KK, laki-laki 23.172 jiwa dan perempuan berjumlah 23.200 jiwa. Penduduk kecamatan Mesuji pada umumnya bekerja atau bermata pencaharian dan disektor pertanian/perladangan. Bataswilayah Kecamatan Mesuji adalah sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Bangun Jaya
- Sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Tanjung Raya
- Sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Simapang Pematang
- Sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Mulya Asri

a. Ruang Lingkup Keadaan Kecamatan

Kecamatan Mesuji terdiri dari beberapa suku diantaranya suku Jawa, Sunda, LampungMesuji , Batak, Padang, dan masih ada yang lainnya. Tingkat kehidupan penduduk pada umumnya bergerak di bidang pertanian terdiri dari sawah dan petani lading, disamping

pertanian atau bercocok tanam sangat potensial juga di bidang peternakan, perdagangan dan industri kecil atau industry rumah tangga. Tentang sumber daya manusia di Kecamatan Mesuji ini pada umumnya masyarakat telah maju di bidang pendidikan.

b. Arah Kebijakan Pengembangan

Dalam rangka untuk mencapai keseimbangan pembangunan daerah yang serasi yang berkelanjutan dengan proses pemberdayaan masyarakat pedesaan dan pembangunan ekonomi yang dapat menunjang program pengentasan kemiskinan melalui program penyediaan prasarana dan sarana pembangunan perekonomian rakyat ini akan memberikan suatu kerangka upaya pemanfaatan potensi wilayah kecamatan yang menekankan kepada sinergi tiga hal pokok yaitu integritas kebijaksanaan pengembangan wilayah, sinkronasi kegiatan pembangunan sektor, dan akomodasi atas potensi dan kebutuhan masyarakat.

c. Potensi Perkembangan

1) Kondisi Fisik Wilayah dan Sumber Daya Alam

Kecamatan Mesuji terletak pada daerah yang sangat strategis yaitu terletak diantara kecamatan-kecamatan yang telah maju/berkembang dengan baik seperti Kecamatan Bangun Jaya dan berbatasan pula dengan Tulang Bawang. Kecamatan Mesuji berada

pada daerah perladangan yang dapat diandalkan sumber daya alamnya. Penggunaan lahan di Kecamatan ini pada umumnya berupa ladang tegalan (38,90%), perkebunan (14,10%), pertanian sawah (10,25%) dan lainnya seperti pemukiman, pembangunan umum, dan lain-lain (36,24%). Kondisi fisik yang demikian sangat berpotensi untuk mendukung program sektoral kecamatan terutama pada sector perladangan dan pertanian.

2) Kondisi Kependudukan

Penduduk Kecamatan Mesuji pada umumnya bekerja pada sector perladangan atau pertanian, hal ini dapat dilihat dari presentasi rumah tangga yang bekerja di sector pertanian atau perladangan (79,06%) sedangkan pada sector industri (2,82%) dan lain-lain (18,12%). Potensi kependudukan pada Kecamatan Mesuji ini mempunyai potensi yang cukup besar dalam rangka mendukung sector perladangan dan pertanian. Sedangkan untuk sector lain seperti industri dan lain-lainnya dapat dijadikan sebagai sector yang sangat menunjang perkembangan kecamatan dimasa mendatang.

3) Kondisi Kegiatan Usaha

Kegiatan sector pada Kecamatan Mesuji sesuai dengan arahan program kecamatan yakni sector pertanian dan

perladangan masih mendominasi kegiatan sektor usaha dan merupakan salah satu kecamatan andalan Kabupaten Mesuji. Masyarakat desa, kelompok-kelompok tani yang selalu mengadakan diskusi kelompok, peran koperasi yang amat besar bagi kegiatan perekonomian masyarakat akan dan di dukung oleh sumber daya aparat kecamatan yang cukup baik.

2. Kondisi PendudukKecamatan Mesuji

Data komposisi penduduk sangat penting untuk perencanaan pemerintah dalam segala bidang maupun dalam bidang usaha. Jika dihubungkan dengan pengentasan kemiskinan dapat diukur dari beberapa indikator kemiskinan. Indikator kemiskinan merupakan ukuran ketetapan masyarakat dimana sapat dikatakan masyarakat tersebut sejahterah atau tidak. Berikut ini beberapa indikator kemiskinan pada warga kecamatan Mesuji, yaitu:

a. Tingkat Kebutuhan Dasar

1) Pengeluaran Konsumsi

Tingkat pengeluaran konsumsi rumah tangga masyarakat dapat dilihat berdasarkan pengeluaran untuk biaya pangan/makanan dan non pangan dapat juga menunjukkan tingkat kesejahteraan masyarakat. Pengeluaran rumah tangga masyarakat Kecamatan mesuji dapat digambarkan indikator kesejahteraan masyarakat

dengan merata-ratakan minimal pengeluaran masyarakat Sukoharjo perbulannya. Berikut ini adalah tabel besaran minimal pengeluaran konsumsi rumah tangga:

Tabel 3.4

Pola konsumsi Masyarakat Kecamatan Mesuji

No	Pola Konsumsi	Jumlah pengeluaran per bulan
1.	Kebutuhan Pangan/Makan	Rp.700.000
2.	Kebutuhan pakaian/Sandang	Rp.300.000
3.	Biaya Pendidikan	Rp.500.000
4.	Biaya Kesehatan	Rp.250.000
5.	Pengeluaran Lain (Listrik, Air)	Rp.200.000

Sumber: hasil wawancara staf kantor Kecamatan Mesuji

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa jumlah pengeluaran pangan atau pola konsumsi rumah tangga terbesar adalah pengeluaran untuk makan/pangan. Pengeluaran untuk pangan ini lebih besar dari pada pengeluaran kebutuhan yang lainnya.

Tabel 3.5

Distribusi Penduduk kecamatan Mesuji Tahun 2016

Berdasarkan Lulusan Pendidikan Umum

NO	Tingkat Pendidikan	JumlahPenduduk	Prosentase
1	Buta aksara	127	3,93%
2	Tidak Tamat SD	163	5,04%
3	SD	710	21,95%
2	SLTP	591	18.26%
3	SLTA	249	7,70%

4	DI/Sederajat	3	0.09%
5	D2/Sederajat	12	0,37%
6	D3/Sederajat	17	0,53%
7	Strata 1 (S1 dan S2)	6	0,18%
Jumlah		46.372	100%

Sumber: Monografi Kecamatan Mesuji Tahun 2016

Berdasarkan tabel 3.2 di atas dapat disimpulkan bahwa pendidikan masyarakat di kecamatan mesuji masih sangat rendah sekali dalam hal pendidikan dimana masih banyak sekali penduduk di kecamatan Mesuji yang hanya lulusan SD dan lulusan SMP yaitu terlihat dengan jelas bahwa data diatas menunjukkan presentase terbesar dari jumlah penduduk yang ada di kecamatan Mesuji adalah tingkatan SD (21,95%) dan yang kedua adalah SLTP sebesar (18,26%) atau sebanyak 591 orang.

3. Kondisi Penduduk Berdasarkan Agama kecamatan Mesuji

Tabel 3.6
Distribusi Penduduk kecamatan Mesuji Tahun 2016
Berdasarkan Agama

NO	Nama Agama	Tempat Ibadah	Jumlah Penduduk	Prosentase
1	Islam	Masjid	2764	85,44 %
2	Kristen	Gereja	121	3.74 %
3	Khatolik	Gereja	311	9,61 %
4	Hindu	Pure	18	0,55 %
5	Budha	Wihara	21	0,64 %
Jumlah			46.372	100%

Sumber: *Monografi Kecamatan Mesuji Tahun 2016*

Berdasarkan tabel 3.3 diatas, dapat disimpulkan bahwa penduduk Kecamatan Mesuji mayoritas beragama Islam (90%). Jumlah penduduk menjadi modal dasar bagi pengembangan ekonomi rakyat. Dilihat dari bidang pengamalan nilai-nilai Islam dengan bidang ekonomi akan menjadi lebih mudah, tinggal bagaimana pelaksanaannya mampu atau tidak menjadikan nilai-nilai Islam menjadi landasa pengembangan ekonomi masyarakat.

4. Kondisi Perekonomian kecamatan Mesuji

Tabel 3.8
Distribusi Penduduk kecamatan Mesuji Tahun 2016
Berdasarkan Jenis PekerjaanKecamatan Mesuji

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah
1	Petani	1496 orang
2	Buruh Tani	197 orang
3	PNS	19 orang
4	TNI/POLRI	-
5	Tukang	18 orang
6	Pedagang	10 orang
7	Peternak	12 orang
5	Jasa	6 orang
6	Pegawai Swasta	2 orang

Sumber : *Monografi* tahun 2016

Berdasarkan tabel 3.4 di atas, dapat diketahui tingkat ekonomi masyarakat kecamatan Mesujimemiliki jenis usaha ekonomi yang beragam. Sebagian besar memiiki mata pencaharian di bidang Pertanian yang memiliki penghasilan dibawah standar. Kondisi ini tentu saja menimbulkan permasalahan serius pada posisi ekonomi

terutama dalam kaitannya dengan upaya penanggulangan kemiskinan masyarakat Desa. Potensi ekonomi yang ada dapat dijadikan peluang usaha untuk meningkatkan derajat hidup masyarakat di kecamatan Mesuji yang sebenarnya diangkap potensial jika dikembangkan dengan baik.

5. Kondisi Perumahan

Table 3.7
Kondisi perumahan

Klasifikasi	Jumlah
permanen	45%
semi permanen	20%
nonpermanen	35%

Sumber : Dokumentasi Kecamatan Mesuji 2016

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa kondisi rumah masyarakat Kecamatan Mesuji Kabupaten Mesuji terdiri dari 3 klasifikasi yaitu rumah premanen, semi premanen, dan non permanen. Rumah premanen yaitu rumah yang memiliki ciri dinding bangunanya dari tembok, berlantai semen atau keramik, dan atapnya beratab genteng. Sedangkan rumah semi premanen yaitu rumah yang memiliki cirri dindingnya setengah tembok atau setengah bambu, lantainya semen, atabnya terbuat dari genteng seng atau asbes. Rumah non

premanen memiliki cirri rumah berdinding kayu, bamboo atau gedek, dan lantai berlantai (tanah), atas rumahnya dari seng atau asbes.

Kondisi rumah masyarakat di kecamatan Mesuji terdiri dari rumah permanen sebesar 45% (enam puluh per seratus), semi permanen sebesar 20% (du puluh per seratus) dan rumah non permanen sebesar 35% (tiga belas per seratus).

B. Program bantuan rumah layak huni di Kecamatan Mesuji

a. Sejarah Program Bantuan Rumah Layak Huni di Kecamatan Mesuji

Kemiskinan merupakan kondisi absolut atau relatif yang menyebabkan seseorang atau kelompok masyarakat dalam suatu wilayah tidak mempunyai kemampuan untuk mencukupi kebutuhan dasarnya sesuai dengan tata nilai atau norma tertentu yang berlaku di dalam masyarakat karena sebab-sebab natural atau alami, kultural, atau struktural. Berikut ini adalah jumlah tingkat penduduk miskin Kabupaten Mesuji dari tahun 2011-2015, yaitu:

Tabel 3.9
Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Mesuji

No	Tahun	Jumlah penduduk miskin
1	2011	67,40
2	2012	67,50
3	2013	67,60
4	2014	67,69
5	2015	68,01

Sumber: data Primer diolah tahun 2016

Berdasarkan data diatas, menunjukkan bahwa jumlah penduduk miskin di Kabupaten Mesuji meningkat dari tahun 2011 sebesar 67,40 dan di tahun 2015 mengalami peningkatan yakni sebesar 68,01. Oleh sebab itu, keefektifan suatu program ekonomi kerakyatan dalam menanggulangi kemiskinan harus benar-benar dilakukan penelitian. Hal ini memberikan bukti bahwa segala bentuk program pemerintah belum berjalan secara maksimal termasuk program bantuan rumah layak huni masyarakat miskin .

Program rumah layak huni untuk masyarakat miskin di Kecamatan Mesuji berlangsung sejak tahun 2015. Penyaluran bantuan rumah layak huni ini bagi kelompok masyarakat miskin bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran papan. Disamping itu, program ini merupakan wujud nyata komitmen Pemerintah dalam pemenuhan kebutuhan papan bagi masyarakat miskin yang sekaligus untuk mengurangi beban pengeluaran papan.

Melalui program bantuan rumah layak huni tersebut pemerintah memberikan bantuan kepada masyarakat miskin berupa uang untuk pembelian material bangunan guna memperbaiki rumah atau melengkapi kebutuhan papan. maksud adanya Program bantuan Rumah Layak Huni adalah membantu masyarakat berpenghasilan rendah untuk memiliki rumah yang layak huni. Tujuan dari adanya Program ini yaitu (1) meningkatkan taraf hidup masyarakat menjadi lebih baik, (2) memberikan tempat tinggal yang layak dan (3) memberikan kehidupan yang layak, hidup bersih dan sehat.

b. Implementasi Program bantuan rumah layak huni di Kecamatan Mesuji

Program bantuan rumah layak huni di Kecamatan Mesuji sudah berlangsung sejak tahun 2015, dimana program Bantuan Rumah Layak Huni merupakan salah satu bentuk bantuan penanggulangan kemiskinan bagi masyarakat miskin yang diberikan oleh pemerintah. Menurut ketua Camat Mesuji, bahwa seluruh Desa yang ada di Kecamatan Mesuji ini telah menerima bantuan program barulahu. Namun dalam pendistribusiannya tidak dilakukan setiap bulan, pendistribusian raskin ke titik distribusi hanya dilakukan ketika masyarakat benar-benar dalam masa kesulitan pangan (peceklik) atau sedang mengalami gagal panen. Hal ini menyebabkan ketidak pastian kapan dan berapa kali dalam setahun raskin diberikan kepada masyarakat. Proses pendistribusian

barulahu hanya dilakukan sampai titik kelurahan yang menerima bantuan, dan untuk proses penyerahan barulahu sampai kepada penerima bantuan dilakukan oleh pihak pelaksana di kelurahan.

Program bantuan rumah layak huni di Kecamatan mesuji ini belum bisa dikatakan efektif, Karena masih banyak masyarakat miskin yang benar-benar membutuhkan belum mendapatkan bantuan barulahu, dan di Kecamatan Mesuji banyaknya masyarakat yang kurang kesadaran akan pentingnya barulahu bagi masyarakat miskin. Adanya kurang ketepatan pemberian raskin karena masih banyak masyarakat yang menuntut apabila tidak diberikan tidak ikut serta dalam pembangunan desa, dan juga berdasarkan hasil observasi langsung masih adanya pilih kasih yang diberikan di kecamatan Mesuji.

C. Pelaksanaan Program Bantuan Rumah Layak Huni

Pelaksanaan program pembangunan/ pengadaan rumah layak huni tersebut di tujukan untuk masyarakat miskin yang ada di Kabupaten Mesuji pada umumnya dan di Kecamatan Mesuji pada khususnya. Adapun criteria untuk ukuran sederhana rumah layak huni yang dibangun yaitu rumah dilengkapi fasilitas MCK (mandi, cuci, kakus). Sedangkan persyaratan atau criteria masyarakat miskin yang berhak untuk mendapatkan rumah layak huni berdasarkan BAPEMAS antara laina dalah:

1. Memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP)
2. Memiliki Kartu Keluarga (KK)
3. Kondisi rumahnya telah rusak atau tidak layak pakai lagi.
4. Mata pencaharian petani atau buruh.
5. Membuat Surat perjanjian untuk tidak menjual rumah.
6. Memiliki surat tanah milik pribadi/ hibah.

Program pembangunan rumah layak huni ini dilaksanakan sesuai yang telah di jelaskan dalam lampiran1 tentang pedoman Pelaksanaan pembangunan Bidang Pemukiman dengan pola pemberdayaan masyarakat tahun 2009, merupakan program pembangunan yang berbasis pada pendekatan pemberdayaan serta partisipasi masyarakat melalui:

- a. Pembangunan yang berkualitas, artinya semua infrastruktur yang di bangun harus memenuhi standar teknik yang telah di tetapkan.
- b. Keberpihakan pada kaum miskin, orientasi kegiatan baik dalam proses maupun pemanfaatan hasil di utamakan bagi penduduk miskin.
- c. Otonomi dan desentralisasi masyarakat memperoleh kepercayaan dan kesempatan yang luas dalam kegiatan baik dalam proses perencanaan, pengawasan maupun pemanfaatan hasilnya.
- d. Partisipatif, masyarakat terlibat secara aktif dalam kegiatan mulai proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan maupun pemanfaatan dengan semangat gotong royong.

BAB IV

ANALISIS DATA

A. Implementasi Program Bantuan Rumah Layak Huni Untuk Masyarakat Miskin Terhadap Pengentasan Kemiskinan di Kecamatan Mesuji.

Kemiskinan merupakan masalah pembangunan di berbagai bidang yang ditandai oleh pengangguran, keterbelakangan dan keterpurukan. Kemiskinan dapat menghambat pencapaian demokrasi, persatuan dan keadilan, sehingga penanggulangan kemiskinan di perlukan dalam rangka memperkuat landasan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Berkaitan dengan hal ini, maka penanggulangan kemiskinan merupakan masalah yang tidak dapat di tunda, dan harus menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan pembangunan, serta merupakan komitmen bersama yang harus di lakukan secara sistematis, lintas sektor, lintas pelaku, terpadu dan berkelanjutan.

Secara umum definisi tentang kemiskinan, menggambarkan kemiskinan sebagai kondisi seseorang atau suatu keluarga berada dalam keadaan kekurangan dan atau ketidak layakan hidup menurut standar-standar tertentu, ketidak mampuan atau keterbatasan fisik manusia, ketiadaan atau kekurangan akses dalam memperoleh pelayanan minimal dalam berbagai bidang kehidupan, serta sulit atau kurang memperoleh akses dalam proses-proses pengambilan kebijakan.

Program Bantuan Rumah Layak Huni di Kabupaten Mesuji merupakan salahsatu program pengentasan kemiskinan di Kabupaten Mesuji yang pelaksanaannya di limpah pada salah satu instansi pemerintah Kabupaten Mesuji yaitu Dinas Sosial Kabupaten Mesuji sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji No.5 Tahun 2012.

Sebagai indikator yang berangkat dari pemikiran-pemikiran yang sudah dipaparkan dalam landasan teori pada bab kedua yang mengukur kemiskinan masyarakat karena adanya program bantuan rumah layak huni, maka data-data yang diperoleh adalah sebagai berikut:

1. Tingkat Kebutuhan dasar

Kebutuhan dasar merupakan unsur-unsur yang dibutuhkan oleh manusia dalam mempertahankan keseimbangan fisiologis maupun psikologis, yang tentunya bertujuan untuk mempertahankan kehidupan dan kesehatan manusia. Kebutuhan dasar dalam hal ini adalah kebutuhan akan makan,perumahan, kesehatan dan perlindungan, dari kebutuhan dasar tersebut tingkat kebutuhan yang berpengaruh dengan adanya program raskin, yaitu:

- a. Tingkat Kebutuhan Pangan/kebutuhan akan makan

Kebutuhan pangan adalah kebutuhan pokok yang sangat penting, karena manusia harus memenuhi kebutuhan pangannya setiap hari.Pada tingkat kebutuhan pangan dapat dikatakan bahwa rumah tangga/keluarga sangat mementingkan dalam memenuhi kebutuhan pangannya.

Berdasarkan data pada lapangan, bahwa seluruh masyarakat penerima raskin sudah terpenuhi tingkat kebutuhan pangannya. Dari hasil wawancara menyatakan bahwa pola makan masyarakat penerima bantuan rumah layak huni sudah memenuhi standar pemenuhan kebutuhan pangan keluarga yaitu minimal dua kali dalam sehari dan juga masyarakat yang mengkonsumsi ikan dalam dua kali seminggu. Berdasarkan hal ini bahwa kondisi masyarakat penerima raskin sudah terpenuhi dari segi kebutuhan pangan. Mengingat bahwa program raskin di Kecamatan Mesuji tidak tepat sasaran dan tidak tepat waktu dalam pendistribusiannya kepada masyarakat yang mengakibatkan masih banyaknya masyarakat yang sudah dinyatakan mampu tetap menerima beras raskin sehingga tidak memberikan dampak terhadap kesejahteraan masyarakat penerimanya, karena masyarakat sudah mampu memenuhi kebutuhan pokoknya sebelum menerima bantuan dan juga tidak menentu waktu pendistribusiannya, dengan begitu program rumah layak huni tidak begitu memberikan dampak baik bagi rumah tangga/keluarga, karena pada dasarnya rumah tangga/keluarga harus memenuhi kebutuhan pangan setiap harinya, jika keluarga hanya mengandalkan beras subsidi, tingkat kebutuhan pangan keluarga tidak akan terpenuhi. Karena pendistribusian beras di Kecamatan Mesuji tidak dilaksanakan secara rutin setiap bulannya, akan tetapi hanya dikeluarkan atau diberikan jika masyarakat sangat membutuhkannya, seperti gagal panen atau paceklik.

Program bantuan rumah layak huni merupakan kebijakan pemerintah dari berbagai program pengentasan kemiskinan yang berbasis bantuan langsung tunai berupauang atau barang. Secara umum program bantuan rumah layak huni bertujuan untuk mengatasi kemiskinan masyarakat dalam mengentaskan diri dari kemiskinan. Prinsip kesediaan dalam program bantuan rumah layak huni ini mendorong masyarakat berperan aktif dalam pembangunan. Program bantuan rumah layak huni di luncurkan pemerintah sejak tahun 2016 sebagai program salah satu program pengentasan kemiskinan perdesaan maupun kota yang pelaksanaanya sudah mencakup seluruh di Indonesia namun tidak semua kabupaten atau kecamatan mendapatkan bantuan rumah layak huni.

Berdasarkan hasil penelitian, kepala desa selaku pengurus Program Bantuan Rumah Layak huni di Kecamatan Mesuji Kabupaten Mesuji menjelaskan bentuk kegiatan Program Bantuan Rumah Layak Huni yaitu Kegiatan. Kegiatan fisik merupakan proyek pembangunan rumah layak huni yang harus di kerjakan oleh warga Mesuji terutama masyarakat yang mendapatkan bantuan rumah layak huni dan dibantu oleh tukang dan di damping oleh kepala desa. Pada kegiatan fisik, masyarakat dapat membantu berbagai kegiatan yang ada selama pembangunan rumah masyarakat yang mendapat bantuan tersebut belum jadi, kegiatan masyarakat untuk membantu membangun rumah tersebut bersifat gotongroyong kecuali orang yang menjadi tukang, tukang di beri upah

sedangkan masyarakat yang gotongroyong tidak diberipah. Adapun kegiatan non fisik merupakan kegiatan wajib yang dilaksanakan di Kecamatan Mesuji yaitu membangun rumah layak huni.

Tujuan umum Program Bantuan rumah layak huni yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengentaskan kemiskinan bagi masyarakat miskin secara umum. Hasil survey yang diperoleh dilapangan, menunjukkan bahwa Program Bantuan Rumah Layak Huni di Kecamatan Mesuji sangat bermanfaat bagi masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengentaskan kemiskinan masyarakat di Kecamatan Mesuji, terbukti dari program yang adaseperti :

Program fisik (pembangunan rumah layak huni). Berdasarkan hasil keputusan rapat penyusunan rencana Program Bantuan Rumah Layak Huni mengeluarkan kegiatan dibidang pembuatan rumah Layak huni di lingkungan Kecamatan Mesuji. Oleh karena itu masyarakat yang mendapat bantuan rumah layak huni di kecamatan Mesuji sepakat melalui musyawarah bersama melakukan gotongroyong dalam memperbaiki rumah masyarakat yang mendapat bantuan di berbagai tempat dengan tujuan memperbaiki ekonomi masyarakat, karena dengan adanya akses bantuan rumah layak huni tersebut masyarakat Kecamatan Mesuji terbantu perekonomiannya dalam bentuk papan (tempat tinggal).

Program bantuan Rumah Layak huni di kelola oleh kelompok masyarakat yang mendapat bantuan rumah layak huni yang di damping

oleh kepala desa dari setiap desanya, peran kepala desa dalam kelompok masyarakat yang mendapat bantuan adalah sebagai ketua kelompok dan pendamping dalam berjalanya program bantuan rumah tersebut, yang mana setiap kelompok terdiri dari satu kepala desa dan sejumlah masyarakat yang menerima bantuan rumah layak huni di setiap desa, persyaratannya adalah semua laki-laki yang sudah berkeluarga, berdomisili di Kecamatan Mesuji yang dibuktikan dengan KTP/KK/identitas diri yang berlaku, keluarga rumah tangga miskin dan tidak mampu, rumah yang akan di bangunberada di kecamatan Mesuji, memiliki rumah di atas lahan sendiri yang dibuktikan dengan surat kepemilikan atas tanah dari pejabat yang berwenang, kondisi rumah memperhatikan sehingga tidak layak untuk dihuni baik secara taestatika maupun pisiknya.

Tabel 4.1
Jumlah Masyarakat Yang Mendapatkan Bantuan bantuan Rumah Layak Huni di kecamatan Mesuji tahun 2017

No	Desa	Nama Penerima Bantuan	Alokasi Dana
1	Sidomulyo	Ponidi	Rp. 20.000.000,-
2	Sidomulyo	Jarul	Rp.15.000.000,-
3	Sumber makmur	Sarw	Rp.15.000.000,-,
4	Sumber Makmur	Sarwok	Rp. 15.000.000,-
5	Sungai Badak	Dasmi	Rp. 15.000.000,-
6	Sungai Badak	Dirun	Rp. 15.000.000,-
7	Suka Maju	Parno	Rp. 15.000.000,-
8	Suka Maju	Kardi	Rp. 15.000.000,-

9	Nipah Kuning	Sandr	Rp. 15.000.000,-
10	Nipah Kuning	Sarm	Rp. 15.000.000,-
11	Wiralaga 2	Sukar	Rp. 15.000.000,-
12	Wiralaga 2	Sang	Rp. 15.000.000,-
13	Wiralaga 1	Noris	Rp. 15.000.000,-
14	Wiralaga 1	Sarbi	Rp. 15.000.000,-
15	Mulya Sari	Wasil	Rp. 15.000.000,-
16	Mulya Sari	Sudar	Rp. 15.000.000,-
17	Wiralaga Mulya	Supo	Rp. 15.000.000,-
18	Wiralaga Mulya	Wiya	Rp. 15.000.000,-
19	Sumber Makmur	Kasn	Rp. 20.000.000,-
20	Sidomulyo	Saridi	Rp. 20.000.000,-
21	Wiralaga Mulya	Karto	Rp. 20.000.000,-

Sumber : Data di Olah 2017

Berdasarkan data diatas dana yang di dapat dari setiap penerima bantuan rumah layak huni adalah mulai dari Rp.15.000.000 – Rp. 20.000.000, per unit rumah, masyarakat yang mendapat dana bantuan sebesar Rp.15.000.000 tersebut adalah masyarakat yang sudah mempunyai matrial bangunan (semen, batubata, pasir, kayu), dana yang di peroleh dari pemerintah senilai Rp. 20.000.000 tersebut digunakan untuk mencukupi atau membeli matrial bangunan yang kurang dan untuk membayar atau memberupah tukang. Sedangkan masyarakat yang mendapat bantuan sebesar Rp.20.000.000 ini diberikan kepada masyarakat yang belum mempunyai matrial bangunan sama sekali (semen, batubata, pasir, kayu).

Dari hasil penelitian penulis menyatakan bahwa penentuan penerima bantuan rumah layak huni sangat bermanfaat bagimasyarakat, penerima bantuan bukan di lihat atas dasar pendapatan perekonomiannya dan keadaan tempa ttinggal (rumah) penerima bantuan.Selain itu juga jika

dilihat dari pelaksanaannya Progrsm Bantuan Rumah Layak Huni di Kecamatan Mesuji sudah dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan prosedur petunjuk teknis operasional yang telah dibuat oleh pemerintah.

Hanya saja dalam pelaksanaan Program Bantuan Rumah Layak Huni masyarakat di Kecamatan Mesuji kurang berpartisipasi dalam pembangunan sehingga belum ada kesadaran diri masyarakat bahwa pembangunan yang di laksanakan bertujuan untuk perkembangan perekonomian masyarakat sehingga nantinya dapat meningkatkan kesejahteraan dan mengentaskan kemiskinan masyarakat dan juga bisa dikatakan rendahnya sumberdaya manusia dan tidak adanya kesadaran masyarakat dalam memanfaatkan dana yang ada. Karenadana yang di berikan oleh pemerintah sebagian sering disisikan untuk di gunakan kebutuhan mereka sendiri dan dikembangkan untuk menambah pendapatan demi kesejahteraan keluarga melainkan untuk kebutuhan sehari-hari yang tidak dapat membuahkan hasil.

Kesejahteraan masyarakat dapat diukur melalui indikator, indikator kesejahteraan merupakan suatu ukuran tercapainya masyarakat dimana masyarakat dapat dikatakan sejahtera atau tidak sebagai indikator-indikatornya yaitu tingkat pendidikan, tingkat kesehatan, tingkat pendapatan masyarakat, komposisi pengeluaran masyarakat, dan tingkat perumahan masyarakat yang menjadi tolak ukur kesejah teraan masyarakat

dalam program bantuan rumah layak huni. Maka berdasarkan hal tersebut dapat dilihat dari indikator kesejahteraan diantaranya yaitu :

1. Tingkat Pendidikan

Pendidikan merupakan bimbingan atau pertolongan yang diberikan oleh orang dewasa kepada perkembangan anak untuk mencapai kedewasaan dengan tujuan agar anak cakap melaksanakan tugas hidupnya sendiri dengan tidak memerlukan bantuan orang lain.

Masyarakat Kecamatan Mesuji jika ditinjau dari keterbelakangan pendidikan sudah menerapkan kewajiban belajar Sembilan tahun, bahkan ada masyarakat yang meneruskan kejenjang SMA, dan S1. Tetapi hampir 50 % masyarakat Kecamatan Mesuji berpendidikan SMA.

2. Tingkat Kesehatan

Kesehatan adalah suatu keadaan sejahtera dan badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara ekonomis. Indikator kesehatan yang menjadi komponen kesejahteraan yaitu terpenuhinya pangan, sandang, dan kesehatan sehari-hari.

Masyarakat Kecamatan Mesuji dalam pemenuhan gizi sudah tercukupi, hal ini terlihat dari kecukupan akan makan yang dikonsumsi oleh masyarakat. Selain itu juga Masyarakat Kecamatan Pesuji dalam penanganan ibu melahirkan sudah sangat sedikit menggunakan tabib atau dukun bayi, sehingga angka kematian dan ibu melahirkan tidak ada.

Masyarakat Kecamatan Mesuji yang memiliki masalah kesehatan lebih memilih berobat ke puskesmas, puskesmas dan bidan. Serta pola makan dan kebutuhan kalori juga terpenuhi dengan baik sehingga jarang ada warga yang sakit karena kekurangan asupan makanan.

3. Tingkat Pendidikan

Tingkat pendapatan merupakan penghasilan yang diperoleh masyarakat yang berasal dari pendapatan kepalaramah tangga. Penghasilan tersebut biasanya dialokasikan untuk konsumsi, kesehatan maupun pendidikan dan kebutuhan lain yang bersifat material. Menurut sistem kendalimutu program Pertahanan, Agrarian dan Tata ruang (SKPM) 2016 tingkat pendapatan perbulan dikatakan sejahtera adalah lebih dari Rp. 500.000.

4. Komposisi Pengeluaran

Pola konsumsi rumah tangga merupakan salah satu indikator kesejahteraan rumah tangga / keluarga. Makin tinggi tingkat penghasilan rumah tangga, maka semakin kecil proporsi pengeluaran untuk makan pada seluruh pengeluaran seluruh rumah tangga. Dapat dikatakan bahwa rumah tangga sejahtera bila presentase pengeluaran makanan akan jauh lebih kecil dibandingkan presentase pengeluaran untuk non makanan atau <80% dari pendapatan.

Meskipun tingkat pendapatan masyarakat tidak menentu karena masyarakat di Kecamatan Mesuji mayoritas petani yang mengandalkan

musim panen. Namun jika pendapatan mereka tinggi maka konsumsi dapat tercukupi dengan baik, akan tetapi jika pendapatan mereka semakin sedikit, maka hanya untuk kebutuhan pangan saja. Umumnya pengeluaran konsumsi berkisar Rp. 20.000 – 30.000 perhari. Ini termasuk biaya pendidikan, kesehatan perumahan serta pajak bumi dan bangunan, kendaraan bermotor dan lain sebagainya.

5. Tingkat perumahan masyarakat

Menurut biro pusat statistic (BPS), dikatakan perumahan yang dianggap sejahtera harus luas lantainya lebih dari 10m² dan bagian terluas rumah bukan tanah, dan status penguasaan tempat tinggal milik sendiri. Bentuk bangunan rumah masyarakat Kecamatan Mesuji sebesar 60% permanen, 27% semi permanen atau masih berbentuk rumah papan, 13% adalah dalam kondisi non permanen, dan seluruh kepatuhan kepemilikan adalah milik sendiri. Sedangkan MCK warga juga 60% yang memiliki sanitasi yang baik selebihnya hanya MCK seadanya. Kondisi sumber air bersih juga kurang baik. Ini terlihat dari pasokan air mengalir untuk setiap warga kampung berbeda-beda. Keadaan penerangan 90% warga sudah menggunakan listrik, dan sekitar 10% warga belum memiliki KWH sendiri.

Apabila dilihat dari indikator perumahan, warga belum dikatakan sejahtera karena luas bangunan belum memenuhi kategori sejahtera. Beberapa indikator yang telah dijelaskan, telah menunjukkan

bahwa program bantuan Rumah Layak Huni berdampak positif bagi masyarakat sekitar seperti tidak harus menggunakan air yang kotor lagi untuk pemenuhan kebutuhan air bersih, sekalipun belum dapat memenuhi 100% kebutuhan air bersih.

Jika dilihat dari beberapa indikator kesejahteraan masyarakat yang ada, keadaan indikator kesejahteraan masyarakat ini belum terpenuhi dengan baik, oleh Program bantuan Rumah layak huni di Kecamatan Mesuji, hanya indikator tingkat kesehatan yang mengalami peningkatan cukup baik.

Dalam islam, bekerja adalah suatu kewajiban bagi mereka yang mampu. Tidak benarkah bagi seorang muslim berpangku tangan dengan alasan bertawakal kepada Allah SWT. Tidak dibenarkan pula bagi seorang muslim bersandar kepada bantuan orang lain sedangkan ia mampu dan memiliki kemampuan. Allah SWT sangat menghargai orang yang berusaha, karena seorang yang berusaha berarti ia telah memenuhi kewajiban.

B. Implementasi Program Bantuan Rumah Layak Huni Dalam Mengentaskan Kemiskinan Di Kecamatan Mesuji Dalam Perspektif Ekonomi Islam.

Ekonomi Islam pada dasarnya memandang bahwa pertumbuhan ekonomi adalah bagian dari pembangunan ekonomi.⁸⁸ Pertumbuhan ekonomi merupakan hal yang sarat nilai. Suatu peningkatan yang dialami oleh faktor produksi tidak dianggap sebagai pertumbuhan ekonomi jika produksi tersebut misalnya memasukan barang-barang yang terbukti memberikan efek buruk dan membahayakan manusia. Di dalam Islam pertumbuhan ekonomi harus berlandaskan nilai-nilai iman, taqwa dan konsistensi serta ketekunan untuk melepaskan segala nilai-nilai kemaksiatan dan perbuatan dosa. Hal tersebut tidak menafikan ek sistensi usaha dan pemikiran untuk mengejar segala ketertinggalann yang sesuai dengan prinsip syariah.

Prinsip-prinsip ekonomi Islam:

a. Keimanan kepada Allah SWT (Tauhid)

Tauhid adalah menyaksikan bahwa tiada satupun yang layak disembah selain Allah dan tidak ada pemilik langit, bumi dan isinya selain dari pada Allah karena Allah adalah pencipta alam dan isinya sekaligus pemiliknya, termasuk pemilik manusia dan seluruh sumber daya yang ada. Karena itu Allah pemilik hakiki. Manusia hanya diberi amanah untuk memiliki sementara waktu. Wujud keimanan manusia

⁸⁸ Directory.Umm.ac.id, Ibnu Khaldun Dan Teori Ekonomi Diakses Pada Tanggal 20 Juni 2017

kepada Allah dapat tercermin dengan cara bekerja keras dan menyadari bahwa Allah selalu mengawasi apa saja yang dilakukan dimuka bumi dan menganggap bahwa bekerjapun bernilai ibadah kepada Allah. Di Kecamatan Mesuji Program Bantuan Rumah Layak Huni sudah berjalan dengan baik. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah angkatan kemiskinan menurun sedangkan jumlah pengangguran menurun, artinya banyak orang yang ingin bekerja keras dari pada bermalas-malasan atau menganggur, oleh karena itu bisa dikatakan bahwa masyarakat Lampung telah melaksanakan prinsip ekonomi islam yaitu iman kepada Allah dengan cara bekerja keras dan tidak bermalas-malasan. Sebagaimana Allah berfirman dalam Q.S Al-Qashash ayat 77:

الْمَ تَرِ إِلَى الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَآمَنَّا
 كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ تَحَشَّوْنَ النَّاسَ كَخَشِيَةِ اللَّهِ أَوْ أَشَدَّ
 خَشِيَةً وَقَالُوا رَبَّنَا لِمَ كَتَبْتَ عَلَيْنَا الْقِتَالَ لَوْلَا أَخَّرْتَنَا إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ قُلْ
 مَتَّعَ الدُّنْيَا قَلِيلًا وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّمَنِ اتَّقَىٰ وَلَا تُظْلَمُونَ فَتِيلًا ﴿٧٧﴾

Artinya :*Dan carilah pada apa yang Telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah Telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.*

Dari ayat al Quran di atas, kita mengetahui bahwa kerja keras ternyata juga diwajibkan dalam Islam, bahkan dalam kegiatan duniawi. Di ayat tersebut kita diajarkan untuk tidak boleh hanya memikirkan kehidupan akhirat saja, melainkan kita juga harus memperjuangkan kehidupan kita di dunia. Kedua hal ini, dunia dan akhirat, harus seimbang diperjuangkan, tidak berat sebelah. Sangat baik untuk kita memaksimalkan ibadah kita untuk akhirat dan sangat baik pula kita untuk bekerja keras pula untuk kesejahteraan hidup kita di dunia.

b. Kepemimpinan (Khalifah)

Manusia adalah khalifah dimuka bumi, Islam memandang bahwa bumi dengan segala isinya merupakan amanah Allah kepada khalifah agar dipergunakan sebaik-baiknya bagi kesejahteraan bersama. Firman Allah dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 22:

الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ ۗ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٢﴾

Artinya :*Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit sebagai atap, dan dia menurunkan air (hujan) dari langit, lalu dia menghasilkan dengan hujan itu segala buah-buahan sebagai rezki untukmu; Karena itu janganlah kamu mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah padahal kamu Mengetahui.*

Ayat diatas sudah jelas bahwa kita sebagai khalifah dimuka bumi ini yang telah dianugerahkan oleh Allah berupa kekayaan alam yang sangat melimpah dipergunakan sebagai modal berproduksi untuk dapat diolah untuk mencapai kemaslahatan bersama.

Pengelolaan sumber daya yang ada berupa pendapatan asli daerah yang merupakan sumber penerimaan daerah yang digali dari potensi daerahnya sendiri yang digunakan sebagai modal berproduksi untuk dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi. Dalam penelitian ini menunjukan bahwa manusia sebagai khalifah (pemimpin) dimuka bumi dianugerahkan oleh Allah berupa kekayaan alam berupa program bantuan rumah layak huni dipergunakan sebagai langkah untuk mengatasi kemiskinan yang telah dikelola dengan baik guna untuk mempercepat pembangunan ekonomi.

c. Keadilan

Keadilan merupakan “*nafas*” dalam menciptakan pemerataan dan kesejahteraan, karena harta jangan hanya beredar pada orang kaya, tetapi juga pada mereka yang membutuhkannya. Allah berfirman dalam QS Al- hasyr ayat 7:

حَتَمَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَعَلَىٰ سَمْعِهِمْ وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غِشْوَةٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ

عَظِيمٌ

Artinya : Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada RasulNya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota Maka adalah untuk Allah, untuk rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang Kaya saja di antara kamu. apa yang diberikan Rasul kepadamu, Maka terimalah. dan apa yang dilarangnya bagimu, Maka tinggalkanlah. dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya.

Berdasarkan ayat diatas dijelaskan bahwa harta jangan hanya beredar diantara orang-orang kaya saja, melainkan kekayaan didistribusikan kepada semua masyarakat sehingga tidak terjadi ketimpangan distribusi pendapatan.

Ketimpangan distribusi pendapatan akan mengakibatkan kekacauan diantara pihak kaya dan miskin. Adanya ketimpangan distribusi pendapatan akan membuat jurang pemisah antara kaya dan miskin. Apabila dibiarkan terlalu lama maka akan mengakibatkan masalah kemiskinan semakin meningkat.

Dari penjelasan diatas, Dalam pembangunan ekonomi diperlukan prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam mengelola sumber daya yang ada. Prinsip keadilan yaitu mendistribusikan kekayaan kepada semua masyarakat sehingga tidak terjadi ketimpangan distribusi pendapatan. Khalifah (kepemimpinan) bahwa kita sebagai khalifah dimuka bumi ini yang telah dianugerahkan oleh Allah berupa kekayaan alam yang sangat melimpah dipergunakan sebagai modal berproduksi untuk dapat diolah untuk mencapai kemaslahatan bersama.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan penulis dalam Analisis Program Bantuan Rumah Layak Huni di Kecamatan Mesuji, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Analisis Program Bantuan Rumah Layak Huni (BARULAHU) yang di dasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji No.5 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Kegiatan Rumah Layak huni sudah berjalan dengan baik sesuai dengan peraturan atau kebijakan yang telah di tetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Mesuji.
2. Dalam pembangunan ekonomi diperlukan prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam mengelola sumber daya yang ada. Prinsip keadilan yaitu mendistribusikan kekayaan kepada semua masyarakat sehingga tidak terjadi ketimpangan distribusi pendapatan. Khalifah (kepemimpinan) bahwa kita sebagai khalifah di muka bumi ini yang telah dianugerahkan oleh Allah berupa kekayaan alam yang sangat melimpah dipergunakan sebagai modal berproduksi untuk dapat di olah untuk mencapai kemaslahatan bersama.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka penulis memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada timpelaksana kegiatan dimulai dari tingkat pusat sampai Masyarakat agar menjalankan tugasnya masing-masing sesuai dengan apa yang telah ditetapkan sehingga tahapan-tahapan yang dilaksanakan sesuai dengan pedoman pelaksanaan program, pencairan dana bantuan serta upah harus tepat pada waktunya agar program terlaksana dengan baik dan program Rumah Layak Huni ini benar-benar menyentuh masyarakat miskin serta dapat mengentaskan kemiskinan pada masyarakat.
2. Diharapkan kepada masyarakat agar selalu ikut serta dan berpartisipasi dalam setiap tahapan kegiatan program rumah tidak layak huni, usulan kegiatan hendaklah lebih melihat apa yang memang dibutuhkan masyarakat bukan melihat dari apa yang diusulkan pemerintah setempat saja, sehingga program tidak mengena kepada masyarakat miskin namun hanya dinikmati oleh sebagian masyarakat saja. Setelah pelaksanaan kegiatan selesai dilaksanakan maka dilakukan pemeliharaan sehingga hasil program bisa dimanfaatkan secara terus menerus oleh masyarakat.
3. Untuk peneliti selanjutnya perlu dilakukan analisis lebih mendalam mengenai analisis program bantuan rumah layak huni terhadap pengentasan kemiskinan di kecamatan mesuji dalam perspektif ekonomi

Islam. Mampu menggali informasi yang lebih mendalam terkait program bantuan rumah layak huni tersebut, karena pada umumnya pemerintah enggan untuk terbuka dan memberikan informasi kepada peneliti.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmadi Abu, *Ilmu Sosial Dasar*, Jakarta, Renika Cipta, 2003.
- Adisasmita Rahardjo, *Teori-Teori Pembangunan Ekonomi*, Yogyakarta, Graha Ilmu, 2013.
- Arsyad Lincolin, *Ekonomi Pembangunan*, Yogyakarta, Universitas Gajah Mada, 2015.
- Basri Faisal, *Perekonomian Indonesia*, Jakarta :, Erlangga, 2002.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2011.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Surabaya, CV Mahkota, Edisi Revisi, 1996.
- Elly M. Setiadi, Kolip Usman, *Pengantar Sosiologi*, Jakarta, Prenadamedia Group, 2011.
- Hakim Lukman, *Prinsip-prinsip Ekonomi Islam*, Bandung, Penerbit Erlangga, 2012.
- Huda Nurul, dkk. *Ekonomi Pembangunan Islam*, Jakarta, Prenadamedia Group, 2015.
- Ibtak S.E, "wawancara pra survey dikantor kecamatan Mesuji" ,Mesuji: 23 juli 2017.
- Irawan dan M. Suparmoko, *Ekonomika Pembangunan*, edisi enam, Yogyakarta, BPFE-Yogyakarta, 2002.
- Ishomuddin, *Sosiologi Perspektif Islam*, Malang, UMM Pres, 2005.
- Malayu S.P. Hasibun, *Menejemen Dasar, Pengertian dan Masalah*, Jakarta, PT Bumi Aksara, 2015.
- , *Ekonomi Sumber Daya Manusia dalam Pospek Pembangunan*, Jakarta, Rajawali Pers, 2012.
- Manan Abdul Muhammad, *Ekonomi Islam: Teori dan Praktik*, (diterjemahkan Oleh potan Arif Harapan, Intermedia, Jakarta, 1992.
- Mubarok dan Cayatin, *Ilmu Kesehatan Masyarakat Teori dan Aplikasi*, PT. Salemba Medika, Gresik, 2008.

- Narbuko Cholid, Achmadi Abu, *Metodologi Penelitian*, Jakarta, Bumi Aksara, 2015.
- Poli Sam F, *Memberdayakan Kaum Miskin*, Yogyakarta, 2005.
- Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), *Ekonomi Islam*, Jakarta, Rajawali Pers, 2011.
- Ruslan Abdul Ghofur Noor, *Konsep Distribusi dalam Ekonomi Islam*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2013.
- Sudarwati Nanik, *Kebijakan pengentasan kemiskinan mengurangi penanggulangan kemiskinan*, Malang, intimedia, 2009.
- Shihab Quraish.M, *Wawasan Tafsir Tematik Atas Berbagai Persoalan Umat*, Bandung, 2014.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, Bandung, ALFABETA, 2014.
- Sumarsono Sonny, *Teori dan Kebijakan Publik Ekonomi Sumber Daya Manusia*, Yogyakarta, Graha Ilmu, 2009.
- Sulastomo, *Sistem Jaminan Nasional Mewujudkan Amanat Konsitusi*, Jakarta, PT.Gramedia Pustaka Utama, 2011.
- Suryabrata Sumadi, *Metode Penelitian*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2015.
- Suwarsono Sri Edi, *Sekitar Kemiskinan dan Keadilan*, Jakarta, Cendikiawan Tentang Islam UI Press, 2007.
- Suwarsono Sri Edi, *Sekitar Kemiskinan Dan Keadilan*, Dari Cendikiawan Tentang Islam , Jakarta, Ui Perss , 2013.
- Tambunan Tulus, *Perekonomian Indonesia*, Bogor, Ghalia Indonesia, 2009.
- Tarigan Robinson, *Ekonomi Regional Teori dan Aplikasi Edisi Revisi*, Jakarta, Bumi Aksara, 2014.
- Yuliadi Imamudin, *Ekonomi Islam, Sebuah Pengantar*, Yogyakarta, Lembaga Pengkajian dan Pengamalan Islam (LPPI) , 2001.
- Yusuf Qhadrawi, *Fikih. Zakat. Muassasat Ar-risalah*, Cet II, Bairut Libanon, 1408./1991 terjemah Didin Hafifudin.

Jurnal

DesianaAlka, “Kemampuan Masyarakat Miskin Memenuhi Persyaratan Bantuan Stimulant Bedah Rumah Studi Kasus Di Desa Labuhan Makmur, Kecamatan Way Serdang, Kabupaten Mesuji”, Sekripsi Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik 2016.

MubaroghahSiti, “Implementasi Program Pembangunan Rumah Layak Huni Di Desa Sangatta Utara Tahun 2014 “, Jurnal Ilmu Pemerintah, Vol. 3, No, 2, 2015.

Pratama Yoghi Citra, “Analisis Faktot-Faktor yang Mempengaruhi Kemiskinan di Indonesia”, Jurnal Bisnis dan Manajemen, Vol. 4 No. 2, Agustus 2014.

RejekiningsihTriwahyuni, “Identifikasi Factor PenyebabKemiskinan Di Kota Serang Dari DimensiCultura”l, JurnalEkonomi Pembangunan, Vol. 72, No. 1, Juni 2011.

SaputraWhisnuAdhi, Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk, PDRB, IPM, Pengangguran Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Kabupaten /Kota Jawa Tengah, Jurnal Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro, dipublikasikan tahun 2011.

Web

Criteria Miskin Menurut Standar BPS” (On-Line). Tersedia Di: [Http://Keluarga.harapan.Com/14-Kriteria-Miskin-Menurut-Standar-Bps/\(2Oktober2016\)](http://Keluarga.harapan.Com/14-Kriteria-Miskin-Menurut-Standar-Bps/(2Oktober2016)).

[http:// hendra kholid.net/blog/2009/12/10/ manajemen-sumber-daya-insani,26-04-2017](http://hendra.kholid.net/blog/2009/12/10/manajemen-sumber-daya-insani,26-04-2017).